



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024.

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2024. Laporan Kinerja tahun 2024 memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebagai wadah untuk menguraikan pencapaian kinerja sepanjang tahun 2024 yang dilaksanakan berdasarkan Renstra TA 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahunan yang telah disepakati. Mekanisme pengukuran kinerja yang dilaksanakan ialah dengan membandingkan antara kinerja yang diperjanjikan dengan kinerja yang telah dicapai.

Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan merupakan umpan balik bagi jajaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk meningkatkan kinerja unit kerja yang akan datang.

Jakarta, 17 Januari 2025

Plt. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Jalan dan Jembatan


Erna Wijayanti

NIP. 198005082005022001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (“Direktorat PPIJJ”) merupakan Unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (“DJPI”) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengemban tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut dan guna memenuhi indikator capaian kinerja, Direktorat PPIJJ mempertajam dengan menyusun rencana lima tahunan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PPIJJ Tahun Anggaran (TA) 2020–2024.

Berdasarkan Renstra tersebut, target tahunan kemudian diturunkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dimana dalam Perjanjian Kinerja tersebut tercantum anggaran belanja Direktorat PPIJJ. Pada tahun 2024, Perjanjian Kinerja Direktorat PPIJJ tercantum anggaran belanja dalam satu tahun kerja yaitu sebesar Rp. 16.151.412.000,-.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud Direktorat PPIJJ dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Pada tahun 2024, total paket kegiatan Direktorat PPIJJ adalah sebanyak 15 paket kegiatan yang terdiri dari 12 paket swakelola dan 3 paket kontraktual. Berdasarkan *e-Monitoring* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, realisasi anggaran yang berhasil dicapai Direktorat PPIJJ per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 15.974.598.000,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 16.151.412.000,-. atau dengan persentase capaian sebesar 98,90%.

Tingkat pencapaian kinerja Direktorat PPIJJ tahun 2024 adalah sebesar 26,38%, dimana artinya Direktorat PPIJJ berhasil mencapai dan melebihi target kinerja yang telah ditentukan yaitu sebesar 25%. Berikut tabel perbandingan antara capaian kinerja terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2024:

Indikator Kinerja Kegiatan / Output		Satuan	Target (PK)	Realisasi
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			25%	26,38%
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2
2	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1
3	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2
4	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	2	4
5	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	1	7
6	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	14	14

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Direktorat PPIJJ dan mempengaruhi dalam melakukan penyiapan proyek KPBU sektor jalan dan jembatan, seperti perubahan ruang lingkup proyek, perubahan rencana pengusahaan proyek, serta permasalahan dalam mencapai kesepakatan dengan para pemangku kepentingan untuk finalisasi proyek KPBU sehingga terdapat beberapa tahapan penyiapan proyek KPBU yang mengalami keterlambatan dari *timeline* yang telah ditargetkan.

Pada tanggal 20 Desember 2024, Direktorat PPIJJ telah resmi mempertahankan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dimana sebelumnya Direktorat PPIJJ berhasil meraih sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP pada tanggal 29 November 2023 dan menjadikan Unit Kerja pertama yang mendapatkan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP di lingkungan DJPI.

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	3
1.3.1 Struktur Organisasi	3
1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)	4
1.4 Sarana dan Prasarana	7
1.5 Isu Strategis	9
1.6 Sistematika Laporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	5
2.1.1 Visi dan Misi	6
2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi	6
2.1.3 Program dan Kegiatan	9
2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	9
2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal	10
2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir	10
2.2.3 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja	11
2.3 Metode Pengukuran	13
2.4 Target Kinerja Tahun 2024	17
2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra	18
2.4.2 Target Kinerja Berdasarkan Renstra	20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	24
3.2 Capaian Kinerja.....	27
3.2.1 Analisis Capaian Kinerja.....	31
3.2.2 Capaian Kinerja Paket Pembiayaan Proyek KPBU Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2024.....	33
3.3 Analisis Perbandingan Kinerja.....	37
3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	37
3.3.2 Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah	37
3.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (<i>Benchmarking</i>) .	40
3.4 Analisis Realisasi Anggaran	44
3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	44
3.4.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	44
3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun 2023	49
3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
3.6 Analisis Pemanfaatan Informasi Dalam Laporan Kinerja	50
3.6.1 Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja.....	50
3.6.2 Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja.....	52
3.6.3 Analisis Penyesuaian Aktifitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala.....	52
3.6.4 Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala	54
3.6.5 Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja.....	54
3.6.6 Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja.....	55
3.6.7 Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja	55
3.7 Penghargaan Atas Kinerja.....	56

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum.....	59
------------------------	----

4.1.1 Faktor pendukung Keberhasilan	60
4.1.2 Permasalahan	60
4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	61
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Komposisi Pegawai di Direktorat PPIJJ Tahun 2024	4
Tabel I.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	5
Tabel I.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	5
Tabel I.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	7
Tabel I.5	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Status Pegawai	7
Tabel I.6	Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia	7
Tabel I.7	Daftar Sarana dan Prasarana Fisik Direktorat PPIJJ	8
Tabel II.1	Perjanjian Kinerja Awal.....	10
Tabel II.2	Perjanjian Kinerja Akhir	10
Tabel II.3	Kronologis Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PPIJJ	11
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Awal.....	11
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Revisi Pertama	11
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja Revisi Kedua	12
Tabel II.7	Perjanjian Kinerja Revisi Akhir.....	13
Tabel II.8	Manual Indikator Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2024.....	14
Tabel II.9	<i>Cascading</i> Kinerja Direktorat PPIJJ.....	16
Tabel II.10	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2024	17
Tabel II.11	Perbandingan Target Capaian Kinerja TA 2024 dengan Capaian Kinerja TA 2023	19
Tabel II.12	Matriks Target Kinerja dan Pendanaan Direktorat PPIJJ Berdasarkan Renstra TA 2020-2024	20
Tabel II.13	Sandingan Target Kinerja Renstra Direktorat PPIJJ TA 2024 dengan Perjanjian Kinerja Direktorat PPIJJ TA 2024.....	21
Tabel III.1	Tabel Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Atas Pelaksanaan SAKIP Tahun 2024 Direktorat PPIJJ.....	25
Tabel III.2	<i>Cascading</i> Direktorat PPIJJ Tahun 2024.....	28
Tabel III.3	Pencapaian Kinerja Direktorat PPIJJ Berdasarkan RO	29
Tabel III.4	Capaian Kinerja Direktorat PPIJJ TA 2024	31
Tabel III.5	Target, Realisasi, dan Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PPIJJ TA 2024	33
Tabel III.6	Capaian Proyek KPBU yang Siap Dikerjasamakan Sektor Jalan dan Jembatan TA 2024	35
Tabel III.7	Perbandingan Kinerja Direktorat PPIJJ dengan Tahun Sebelumnya	37

Tabel III.8 Realisasi Capaian Kinerja Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan Periode 2020-2024	38
Tabel III.9 Target Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.....	41
Tabel III.10 Target Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024.....	41
Tabel III.11 Capaian Realisasi Anggaran Direktorat PPIJJ pada Tahun Anggaran 2024.....	44
Tabel III.12 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024.....	49
Tabel III.13 Bukti Dukung Capaian Keberhasilan Kinerja Direktorat PPIJJ	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Trans Papua.....	1
Gambar I-2	Struktur Organisasi Direktorat PPIJJ	3
Gambar II-1	Jembatan Callender Hamilton (Cimalaya)	5
Gambar III-1	Jalan Lintas Timur Sumatera - Riau	24
Gambar III-2	Kurva S Rencana dan Realisasi Keuangan	48
Gambar III-3	Kurva S Rencana dan Realisasi Fisik.....	48
Gambar III-4	Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja TA. 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	51
Gambar III-5	Dokumentasi Rapat Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ("AKIP") Direktorat PPIJJ TA 2023	51
Gambar III-6	Bukti Dukung Sertifikat Kelulusan Pelatihan Strategi Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	52
Gambar III-7	Bukti Dukung Penyusunan Laporan Mingguan dan Bulanan Secara Berkala dan Pelaksanaan Rapat Kinerja Triwulanan.....	53
Gambar III-8	Bukti Dukung DIPA TA 2024 dan Usulan Kebutuhan Penambahan Anggaran Direktorat PPIJJ	54
Gambar III-9	Dokumentasi Pelaksanaan Pelatihan SMAP Direktorat PPIJJ.....	56
Gambar III-10	Bukti Dukung Pelaksanaan Implementasi SMAP Direktorat PPIJJ Tahun 2024	56



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asas akuntabilitas yang mencerminkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Salah satu bentuk Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (“Direktorat PPIJJ”) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat PPIJJ atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri



Gambar I-1 Trans Papua

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian PUPR. Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2024 dibuat dengan menyajikan informasi mengenai pencapaian atas rencana, tindakan dan kegiatan atas perencanaan dan perjanjian kinerja Direktorat PPIJJ dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional melalui program Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ tahun 2024 juga menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja selama Tahun Anggaran 2024. Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri PAN RB

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat PPIJJ untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

1.2 Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat PPIJJ adalah sebagai berikut:

A. Kedudukan

Direktorat PPIJJ berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Tugas

Direktorat PPIJJ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat PPIJJ menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
3. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
4. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
5. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
6. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

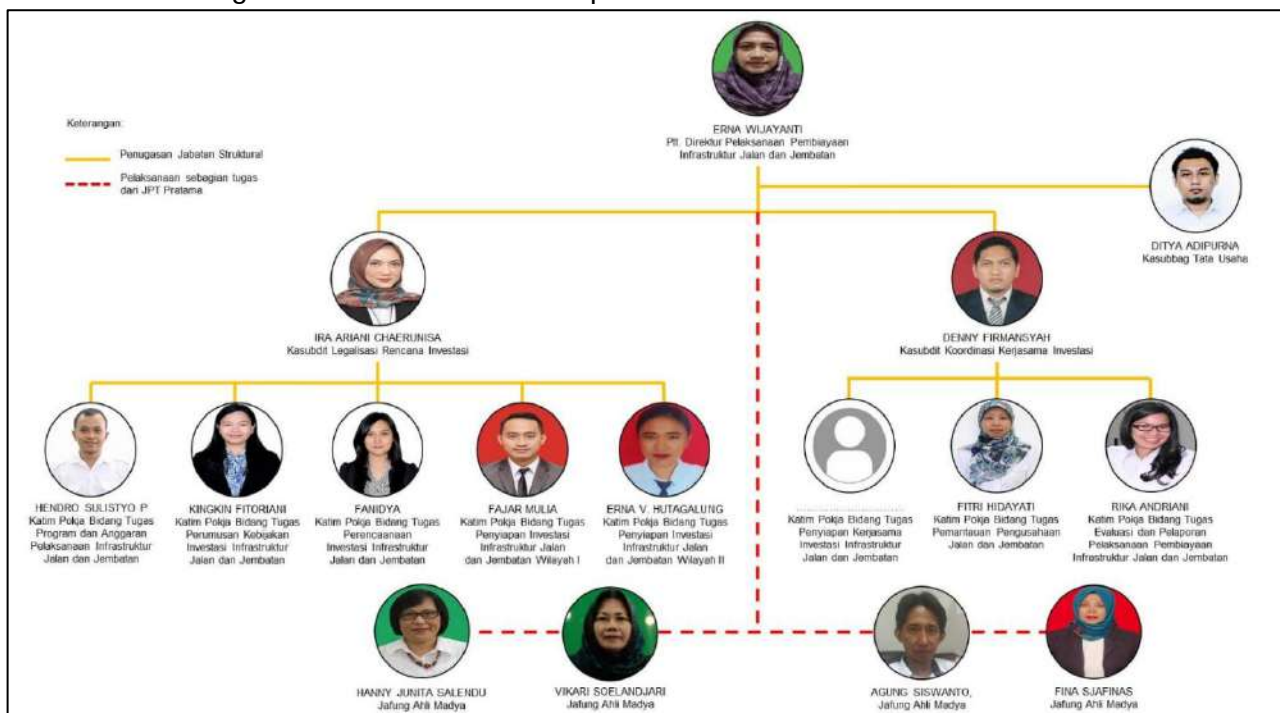
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Direktorat PPIJJ didukung oleh struktur organisasi yang terdiri atas:

- A. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi;
- B. Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
- C. Subbagian Tata Usaha.

Struktur Organisasi Direktorat PPIJJ diperlihatkan dalam Gambar 1 berikut.



Gambar I-2 Struktur Organisasi Direktorat PPIJJ

Pada akhir Tahun 2024, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum sehingga terdapat perubahan struktur organisasi baik di tingkat Eselon I, Eselon II maupun Eselon III di Kementerian Pekerjaan Umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan akan berganti nomenklatur menjadi **“Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga”** yang terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah II;

- c. Subdirektorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga Wilayah III;
- d. Subbagian Tata Usaha.

1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat PPIJJ didukung oleh 59 pegawai yang terdiri pegawai 31 laki-laki dan 28 perempuan dengan rincian serta pengelompokan pegawai sebagai berikut:

1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis

Pada subbab ini disajikan komposisi SDM berdasarkan jenisnya yang meliputi Jumlah PNS, PPPK, PPNP, dan Tenaga Pendukung Individual yang di-breakdown berdasarkan jenis kelamin. Berikut komposisi SDM di Direktorat PPIJJ berdasarkan jenisnya.

Tabel I.1 Komposisi Pegawai di Direktorat PPIJJ Tahun 2024

No	Jenis Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12	18	30
2.	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	10	2	12
3.	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP)	3	2	5
4.	Tenaga Pendukung Individual (TPI)	4	6	10
Total		29	28	57

Sepanjang tahun 2024, terdapat perubahan struktur pegawai di Direktorat PPIJJ yang disebabkan antara lain:

1. Pegawai yang sedang melakukan karya siswa sebanyak 1 (satu) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil;
2. Pegawai yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) sebanyak 1 (satu) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil; dan
3. Pegawai yang ditugaskan ke unit kerja/unit organisasi lain sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Pengemudi).

1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Pada subbab ini disajikan komposisi SDM berdasarkan golongan dan kelompok jabatan yang di-breakdown berdasarkan jenis kelamin. Berikut komposisi SDM di Direktorat PPIJJ berdasarkan golongan dan kelompok jabatan.

Tabel I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1.	II/C	-	2	2
2.	III/A	21	9	30
3.	III/B	3	5	8
4.	III/C	-	3	3
5.	III/D	3	2	5
6.	IV/A	2	4	6
7.	IV/B	-	3	3
Total		29	28	57

Tabel I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
Pegawai Negeri Sipil (PNS)				
1.	Plt. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	-	1	1
2.	Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi	-	1	1
3.	Kasubdit Koordinasi Kerjasama Investasi	1	-	1
4.	Kasubag Tata Usaha	1	-	1
5.	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya	1	1	2
6.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	-	2	2
7.	Analisis Anggaran Ahli Madya	-	1	1
8.	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda	-	1	1
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	2	2
10.	Analisis Anggaran Ahli Muda	-	1	1
11.	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Muda	1	1	2
12.	Arsiparis Ahli Muda	1	-	1
13.	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	5	1	6

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
14.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1	4	5
15.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	-	1	1
16.	Perencana Ahli Pertama	1	-	1
17.	Analisis Kerja Sama	-	1	1
Total PNS		12	18	30
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)				
1.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	6	1	7
2.	Arsiparis Ahli Pertama	1	-	1
3.	Arsiparis Terampil	-	1	1
4.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	1	-	1
5.	Perencana Ahli Pertama	1	-	1
6.	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	1	-	1
Total PPPK		10	2	12
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)				
1.	Analisis Pembiayaan	-	1	1
2.	Penelaah BMN	1	-	1
3.	Penelaah Kebijakan	1	-	1
4.	Penelaah Tata Naskah Dinas	-	1	1
5.	Pramubakti	1	-	1
Total PPNPN		3	2	5
Tenaga Pendukung Individual (TPI)				
1.	Analisis Investasi dan Pasar Konstruksi	-	1	1
2.	Analisis Pembiayaan	-	1	1
3.	Analisis Perencanaan	1	1	2
4.	Pengolah Monev dan pelaporan	1	1	2
5.	Analisis Penelaah Kebijakan	2	2	4
Total TPI		4	6	10
Total Pegawai		29	28	57

1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Pada subbab ini disajikan komposisi SDM berdasarkan pendidikan dan usia yang di-breakdown berdasarkan jenis kelamin dan status pegawai. Berikut komposisi SDM di Direktorat PPIJJ berdasarkan pendidikan dan usia.

Tabel I.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1.	D3	-	2	2
2.	S1	22	14	36
3.	S2	7	12	19
Total		29	28	57

Tabel I.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Status Pegawai

No	Pendidikan	PNS	PPPK	PPNPN	KI	Jumlah
1.	D3	-	-	1	1	2
2.	S1	12	11	5	8	36
3.	S2	18	-	-	1	19
Total		30	11	6	10	57

Tabel I.6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1.	21-25	2	1	3
2.	26-30	4	9	13
3.	31-35	8	7	15
4.	36-40	4	3	7
5.	41-45	5	3	8
6.	46-50	3	2	5
7.	51-55	3	-	3
8.	56-60	-	3	3
Total		29	28	57

1.4 Sarana dan Prasarana

Dalam mencapai target kinerja organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Direktorat PPIJJ dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja baik berupa barang fisik maupun non fisik (*software*). Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan bisa dipergunakan sesuai fungsinya. Fasilitas sarana dan prasarana tersebut terdapat pada rincian sebagai berikut:

Tabel I.7 Daftar Sarana dan Prasarana Fisik Direktorat PPIJJ

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	
1	3.05.02.04.002	AC SENTRAL-CASSETTE	5	Unit
2	3.05.02.04.004	AC SPLIT	7	Unit
3	3.05.01.05.053	ACCES CONTROL SYSTEM	1	Unit
4	3.05.02.03.005	AIR CLEANER	1	Unit
5	3.05.01.05.015	ALAT PENGHANCUR KERTAS	4	Unit
6	3.05.02.04.007	EXHAUSE FAN	1	Unit
7	3.05.01.04.005	FILLING CABINET BESI	6	Unit
8	3.05.01.05.058	FOCUSING SCREEN/LAYAR LCD PROJECTOR	1	Unit
9	3.05.02.05.008	KITCHEN SET	1	Unit
10	3.05.02.01.003	KURSI BESI/METAL	2	Unit
11	3.05.02.01.020	KURSI FIBER GLAS/PLASTIK	55	Unit
12	3.10.01.02.002	LAPTOP	3	Unit
13	3.05.01.05.048	LCD PROJECTOR/INFOCUS	2	Unit
14	3.05.01.04.001	LEMARI BESI/METAL	16	Unit
15	3.05.01.04.002	LEMARI KAYU	2	Unit
16	3.05.02.01.002	MEJA KERJA KAYU	39	Unit
17	3.05.02.01.019	MEJA MAKAN KAYU	2	Unit
18	3.05.02.01.008	MEJA RAPAT	2	Unit
19	3.05.02.01.014	MEJA RESEPSIONIS	1	Unit
20	3.05.02.01.033	SOFA 1 SEATER	3	Unit
21	3.05.02.01.026	NAKAS	6	Unit
22	3.10.01.02.003	NOTEBOOK	3	Unit
23	3.10.01.02.001	P.C UNIT	27	Unit
24	3.10.02.03.003	PRINTER	28	Unit
25	3.05.01.04.004	RAK KAYU	1	Unit
26	3.10.02.03.004	SCANNER	1	Unit
27	3.05.02.06.002	TELEVISI	3	Unit
28	3.05.01.05.010	WHITE BOARD	1	Unit
TOTAL			224	Unit

1.5 Isu Strategis

Beberapa isu strategis terkait permasalahan yang umumnya dihadapi oleh Direktorat PPIJJ adalah sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pengadaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama;
2. Terdapat beberapa calon pemrakarsa pada Proyek KPBU *Unsolicited* yang tidak dapat menyelesaikan dan menyampaikan Dokumen Studi Kelayakan dan dokumen pendukung sesuai batas waktu yang telah ditentukan sehingga terjadi pencabutan izin prinsip pemrakarsa;
3. Ketersediaan lahan yang *clear and clean* untuk proyek KPBU;
4. Terbatasnya kapasitas fiskal untuk pembayaran Proyek KPBU dengan skema *Availability Payment*/Ketersediaan Layanan;
5. Dukungan kelayakan proyek dan penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU terbatas untuk mendanai seluruh proyek KPBU;
6. Terdapat beberapa ruas PPJT yang memerlukan perhatian seperti:
 - a. Lamanya proses pemenuhan *financial close* bagi Badan Usaha yang telah memenangkan proses lelang. Hal ini disebabkan karena perpanjangan *financial close* lebih dari satu kali karena belum terpenuhinya persyaratan Calon Kreditur;
 - b. Potensi pengakhiran karena risiko politik dan/atau belum terpenuhinya kewajiban pemerintah; dan
 - c. Permintaan revidir PPJT dikarenakan realisasi volume lalu lintas yang jauh dari rencana usaha PPJT.

1.6 Sistematika Laporan

Setelah pembahasan Bab I “Pendahuluan” yang meliputi penjelasan umum organisasi, aspek strategis, dan isu/permasalahan utama yang sedang dihadapi Direktorat PPIJJ, sistematika selanjutnya dari penyajian Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ adalah sebagai berikut:

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar perjanjian kinerja yang disajikan melalui uraian Renstra Direktorat PPIJJ TA 2020-2024, Perjanjian Kinerja Direktorat PPIJJ tahun 2024, dan target 2024 menurut Renstra.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Direktorat PPIJJ 2024, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi anggaran, penggunaan sumber daya dan pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Daftar Penghargaan yang Diperoleh, Metode Pengukuran Kinerja, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, serta Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur PUPR.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Rencana Strategis (“Renstra”) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi terhadap Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Tujuan Direktorat PPIJJ merupakan penjabaran salah satu tujuan dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pembangunan infrastruktur, khususnya sektor jalan dan jembatan merupakan salah satu infrastruktur vital yang akan menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi. Pembangunan



Gambar II-1 Jembatan Callender Hamilton (Cimalaya)

prasarana jalan dan jembatan memiliki fungsi aksesibilitas untuk membuka daerah kurang berkembang dan fungsi mobilitas untuk memacu daerah yang telah berkembang. Kementerian PUPR pada tahun 2015-2019 telah melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi pembangunan jalan sepanjang 3.867 km, jembatan baru sepanjang

58.346 m, dan jalan bebas hambatan sepanjang 1.500 km. Pada target output utama Renstra Kementerian PUPR tahun

2020-2024, untuk sektor jalan dan jembatan Kementerian PUPR menargetkan dapat terbangun jalan nasional baru sepanjang 2.500 km, jembatan baru sepanjang 60.000 m, dan jalan bebas hambatan sepanjang 1.500 km.

2.1.1 Visi dan Misi

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat PPIJJ sebagaimana Renstra Direktorat PPIJJ TA 2020–2024 dan disusun berdasarkan target *output* Kementerian PUPR di sektor jalan dan jembatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Konektivitas

Peningkatan konektivitas jalan dilaksanakan untuk mengurangi waktu tempuh. Waktu tempuh yang tinggi dapat berdampak pada biaya logistik yang tinggi dan dapat menghambat daya saing Indonesia di dunia global. Diharapkan pada tahun 2024 dapat diwujudkan dominasi

jaringan jalan nasional yang memiliki waktu tempuh di bawah 2,0 jam/100 km (dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam).

2. Peningkatan Aksesibilitas

Peningkatan aksesibilitas akan didorong untuk mendukung simpul/kawasan wilayah strategis yang sudah terhubung jalan nasional, khususnya yang mendukung pengembangan wilayah melalui pembangunan jalan pada jalan lintas utama pulau, jalan yang mendukung kawasan industri dan pariwisata prioritas, jalan akses ke simpul transportasi prioritas, jalan lingkar/trans pulau terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dan kawasan perbatasan. Sebagai contoh, penyelesaian jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Aceh – Provinsi Lampung menjadi program prioritas untuk menurunkan waktu tempuh. Kemudian adanya Pembangunan Jalan Trans Papua yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah, meningkatkan ekonomi di Provinsi Papua serta meningkatkan ketersediaan jaringan jalan, mengingat Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Mamberamo adalah bagian dari jalan non tol di Papua yang merupakan tulang punggung regional Pulau Papua. Contoh lainnya adalah Flyover Sitinjau Lauik ini sangat dinantikan dan menjadi elemen penting dalam meningkatkan kelancaran arus logistik barang di kawasan Sumatera Barat. Flyover ini memiliki peran strategis, tidak hanya dalam mempercepat distribusi logistik, tetapi juga dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi di jalur Sitinjau Lauik yang terkenal curam dan rawan longsor. Kehadiran flyover ini memungkinkan kendaraan berat dan logistik di wilayah Sumatera Barat dapat melalui jalur yang lebih aman dan nyaman sehingga proses distribusi menjadi lebih efektif dan mampu mengurangi tekanan lalu lintas di wilayah sekitarnya.

Sementara itu, pembangunan jalan akses ke simpul prioritas diarahkan untuk menjamin kemanfaatan infrastruktur secara optimal seperti pelabuhan dan bandara, seperti diantaranya dengan menyediakan akses ke pelabuhan utama Kuala Tanjung sehingga dapat mendukung berkembangnya kawasan industri di sepanjang koridor tersebut.

3. Peningkatan Kapasitas Jalan

Peningkatan kapasitas jalan didorong untuk menjadi solusi kemacetan telah menjadi persoalan utama pada jaringan jalan nasional yang menyebabkan rendahnya tingkat kinerja angkutan barang dan orang. Peningkatan kapasitas jalan juga diprioritaskan untuk mengurangi praktik pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) melalui penyelenggaraan jembatan timbang yang terintegrasi dengan penyelenggaraan jalan.

Mengingat kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan konektivitas, aksesibilitas, dan kapasitas jalan yang sangat besar, diperlukan inovasi skema pembiayaan infrastruktur selain

APBN, salah satunya adalah seperti KPBU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan program dana bergulir (*revolving fund*) khususnya untuk pengembangan jalan tol.

Skema pembiayaan KPBU saat ini terbagi menjadi 2 (dua), salah satunya adalah KPBU berbasis *User Charge* dimana pengembalian investasi berdasarkan tarif pengguna jalan, dan KPBU berbasis *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja. Skema KPBU-AP diharapkan dapat menjadi solusi pembiayaan untuk meningkatkan kualitas jalan melalui keterpaduan penyelenggaraan jalan, salah satunya adalah dengan pengoperasian jembatan timbang untuk mengendalikan perilaku pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan.

Strategi kebijakan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

1. Mengingat kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan konektivitas, aksesibilitas, dan kapasitas jalan yang sangat besar, diperlukan inovasi skema pembiayaan infrastruktur selain APBN, salah satunya adalah seperti KPBU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan program dana bergulir (*revolving fund*) khususnya untuk pengembangan jalan tol.
2. Skema pembiayaan KPBU saat ini terbagi menjadi 2 (dua), salah satunya adalah KPBU berbasis *User Charge* dimana pengembalian investasi berdasarkan tarif pengguna jalan, dan KPBU berbasis *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja. Skema KPBU-AP diharapkan dapat menjadi solusi pembiayaan untuk meningkatkan kualitas jalan melalui keterpaduan penyelenggaraan jalan, salah satunya adalah dengan pengoperasian jembatan timbang untuk mengendalikan perilaku pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan.
3. Menciptakan Pembiayaan kreatif lain seperti Strategi *Three Bold Actions* yang meliputi *Fast Track* KPBU, Peningkatan Kepastian dalam Investasi (*Investment Certainty*), dan Integrasi Prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) pada Proyek KPBU. Melalui strategi dan langkah-langkah inovatif ini, diharapkan dapat tercapai perbaikan dalam proses bisnis KPBU di Kementerian PUPR, serta peningkatan kualitas Proyek KPBU. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan ketertarikan investor terhadap proyek KPBU.
4. Target proyek yang akan dikerjakan pada tahun 2020-2024, diantaranya: pembangunan direncanakan sepanjang 2.500 km jalan baru dan 60.000 m jembatan baru. Selain itu, Kementerian PUPR juga ditargetkan akan menambah jalan bebas hambatan sepanjang 1.500 km di tahun 2020-2024.

2.1.3 Program dan Kegiatan

Untuk mempertajam capaian sasaran (*output*) dalam Rencana Strategis Direktorat PPIJJ, kegiatan pokok pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan adalah kegiatan teknis yang dilaksanakan unit kerja setingkat eselon III dalam organisasi Direktorat PPIJJ dengan rincian sebagai berikut.

1. Tersedianya dokumen perencanaan kerjasama pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Tersedianya dokumen penyiapan kerjasama pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
3. Tersedianya dokumen penyiapan dukungan kerjasama pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
4. Tersedianya dokumen penyiapan transaksi dan kerjasama pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
5. Tersedianya paket pembiayaan pelaksanaan transaksi dan pendampingan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
6. Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
7. Tersedianya Laporan Kinerja pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang membuat perjanjian untuk melaksanakan program/kegiatan berdasarkan indikator kinerja tertentu. Di dalam Perjanjian Kinerja terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam satu tahun yang dibekali dengan pagu anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Direktorat PPIJJ menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen yang merepresentasikan tujuan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Direktorat PPIJJ sebagai salah satu unit kerja yang mendukung pelaksanaan program dan kebijakan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2024 memiliki sasaran program meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. Wujud kegiatan dari sasaran program tersebut yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja

adalah penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. Berikut Rincian dokumen Perjanjian Kinerja TA 2024 awal dan perubahannya:

2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Awal

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2023	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25%	25%
Kegiatan	Anggaran	
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rp17.106.189.000	

2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Akhir

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2023	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25%	25%
Kegiatan	Anggaran	
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rp16.151.412.000	

2.2.3 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan Juli, Oktober dan Desember. Perubahan dilakukan dengan merinci lebih detail terkait indikator kinerja yang ditargetkan hingga akhir tahun. Kronologis revisi pagu anggaran Direktorat PPIJJ Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II.3 Kronologis Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PPIJJ

No	Perjanjian Kinerja	Pagu Anggaran	Tanggal Terbit
1	PK Awal	17.106.189.000	Januari 2024
2	PK Revisi Pertama	16.587.392.000	Juli 2024
3	PK Revisi Kedua	16.467.392.000	Oktober 2024
4	PK Akhir	16.151.412.000	Desember 2024

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Awal

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25%
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2 Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	9 Dokumen
Layanan Perkantoran	1 Layanan
Kegiatan:	
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rp 17.106.189.000

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Revisi Pertama

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	

SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25%
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2 Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6 Dokumen
Layanan Perkantoran	1 Layanan
Kegiatan:	
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rp 16.587.392.000

Revisi pertama Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 dilakukan pada Bulan Juli 2024. Pada revisi pertama ini terjadi perubahan jumlah target output pada Rincian Output (RO) “Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan” yang semula 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan menjadi 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan dan RO “Layanan Pemantauan dan Evaluasi” yang semula 9 (sembilan) Dokumen menjadi 6 (enam) Dokumen. Pada perubahan Perjanjian Kinerja pertama ini mengakibatkan perubahan nilai pagu anggaran Direktorat PPIJJ yaitu turun menjadi sebesar Rp 16.587.392.000,-.

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Revisi Kedua

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25%
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2 Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6 Dokumen
Layanan Perkantoran	1 Layanan
Kegiatan:	
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rp 16.467.392.000

Revisi kedua Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 dilakukan pada Bulan Oktober 2024. Adapun revisi kedua ini tidak ada perubahan pada target output pada seluruh RO, namun terjadi

perubahan nilai pagu anggaran Direktorat PPIJJ yaitu turun menjadi sebesar Rp 16.467.392.000,- karena adanya optimasi pagu anggaran seluruh unit kerja di lingkungan DJPI.

Tabel II.7 Perjanjian Kinerja Revisi Akhir

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25%
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2 Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	14 Dokumen
Layanan Perkantoran	1 Layanan
Kegiatan:	
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rp 16.151.412.000

Revisi akhir Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 dilakukan pada Bulan Desember 2024. Adapun revisi akhir ini terdapat perubahan target output pada RO “**Layanan Pemantauan dan Evaluasi**” yang semula 6 (enam) Dokumen menjadi 14 (empat belas) Dokumen. Adapun untuk nilai pagu anggaran Direktorat PPIJJ juga mengalami perubahan kembali dari yang sebelumnya sebesar Rp 16.467.392.000,- turun menjadi sebesar Rp 16.151.412.000,- karena adanya optimasi pagu anggaran kembali untuk seluruh unit kerja di lingkungan DJPI.

2.3 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah persentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja utama. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang

selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Indikator keberhasilan biasanya dikaitkan dengan target-target tertentu yang hendak dicapai. Indikator Kegiatan (*output*) adalah indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dan tercapainya *output* kegiatan tersebut. Penetapan indikator didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang mudah diukur dan mudah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Indikator Sasaran Program dan Kegiatan pada Renstra Tahun 2020-2024 Direktorat PPIJJ, serta cara perhitungannya sebagai berikut:

Tabel II.8 Manual Indikator Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2024

Sasaran	Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SP 01	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%)	IKSP2, dihitung penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) berikut: Indikator 1 (30%) Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target dikali 100% Indikator 2 (35%) Dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah paket pembiayaan kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang masuk Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan dengan target dikali 100%. Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan terdiri dari Studi Pendahuluan/Pra FS, OBC. FBC (FS). Indikator 3 (35%) Dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah

Sasaran	Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				paket pembiayaan kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan (minimal tahap prakualifikasi) dengan target dikali 100%.
SK 02	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan: 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebagai berikut: Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang disusun dibandingkan dengan target Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target.

Metode pengukuran yang dilakukan dalam menghitung capaian kinerja serta *output* kegiatan yang ingin dicapai Direktorat PPIJJ merupakan turunan dari *cascading* kinerja yang diuraikan dalam Renstra DJPI TA 2020–2024. Berdasarkan *cascading* kinerja tersebut, target capaian Sasaran Kegiatan di tahun 2024 saling terintegrasi di antara unit kerja yang ada di DJPI sehingga mengakibatkan adanya *sharing* dalam pencapaian sasaran kegiatannya, dari target sebesar 100% dibagi untuk empat unit kerja yang ada di DJPI yaitu menjadi 25%. *Cascading* kinerja Direktorat PPIJJ berdasarkan Renstra sebagai berikut:

Tabel II.9 Cascading Kinerja Direktorat PPIJJ

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN										
Sasaran Strategis (SS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Indikator	Output Kegiatan	Bobot Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkat-nya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkat-nya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Jalan dan Jembatan yang disusun dibandingkan dengan target	50%	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	10%
									Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	15%
									Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	15%
									NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	10%
						Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Jumlah Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target	50%	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	30%
									Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	20%
									Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	-

2.4 Target Kinerja Tahun 2024

Direktorat PPIJJ dalam memenuhi ketercapaian sasaran program dan kegiatan telah merencanakan output indikator dan menetapkan target per indikator setiap tahunnya sebagai upaya terselenggaranya pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. Target pencapaian sasaran Direktorat PPIJJ pada tahun 2024 per masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.10 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2024 Berdasarkan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan / Output		Target 2024
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		25%
<i>Output</i>	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan
	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan
	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Rekomendasi Kebijakan
	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2 Kesepakatan
	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 NSPK
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6 Dokumen
	Layanan Perkantoran	1 Layanan

Sumber: Revisi Renstra DJPI TA 2020-2024

Terdapat perbedaan jumlah target output pada Rincian Output (RO) “**Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan**” dan “**Layanan Pemantauan dan Evaluasi**” antara target revisi Renstra DJPI TA 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja Revisi Akhir (revisi Desember 2024) dan DIPA Revisi ke-13 (2 Desember 2024), dimana RO Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada revisi Renstra DJPI TA 2020-2024 ditargetkan 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan sedangkan pada Perjanjian Kinerja Revisi Akhir dan DIPA Revisi ke-13 ditargetkan 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan. Kemudian, untuk RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi pada revisi Renstra DJPI TA 2020-2024 ditargetkan 6 (enam) Dokumen sedangkan pada Perjanjian Kinerja Revisi Akhir dan DIPA Revisi ke-13 ditargetkan 14 (empat belas) Dokumen.

2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra

Pada Renstra DJPI periode 2020-2024 dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) mengemban 2 program yaitu (1) Program Dukungan Manajemen (Koordinator: Sekretariat Jenderal); dan (2) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Koordinator: Ditjen Cipta Karya). Dua Program tersebut merupakan program yang digunakan DJPI dalam rangka mencapai tujuan Sasaran Strategis. Sasaran Strategis tersebut di-*breakdown* menjadi Sasaran Program. Sasaran Program (SP) DJPI yaitu:

1. Sasaran Program Dukungan Manajemen yaitu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Indikator Kinerja Program terdiri dari dua indikator yaitu:
 - a. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR (Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR), diampu oleh Sekretariat DJPI, BLU PPDPP dan Direktorat di lingkungan DJPI; dan
 - b. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif, diampu oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, **Jalan dan Jembatan**, Permukiman dan Perumahan.
2. Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman. Indikator Kinerja Program tersebut mencakup Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Dari penjelasan diatas, Direktorat PPIJJ mendukung pada Sasaran Program 1 dan Indikator Kinerja Program 2 yaitu Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif seperti yang telah ditanda tangani dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2024. Berikut tabel dibawah ini yang memperlihatkan Target PK Direktorat PPIJJ TA 2024 yang disandingkan dengan Realisasi PK Direktorat PPIJJ Tahun 2023.

Tabel II.11 Perbandingan Target Capaian Kinerja TA 2024 dengan Capaian Kinerja TA 2023

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Realisasi PK 2023	Target PK 2024
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	98,95 %	100 %
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25 %	25 %

2.4.2 Target Kinerja Berdasarkan Renstra

Berdasarkan penetapan anggaran di dalam Renstra Direktorat PPIJJ TA 2020-2024, total kebutuhan pendanaan kegiatan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan oleh Direktorat PPIJJ pada tahun 2024 adalah sebesar Rp16.467.392.000. Berikut matriks target kinerja dan pendanaan Direktorat PPIJJ berdasarkan Renstra TA 2020-2024

Tabel II.12 Matriks Target Kinerja dan Pendanaan Direktorat PPIJJ Berdasarkan Renstra TA 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Jumlah Laporan Kinerja Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	2	1	1	1	1	6	750	400	500	500	500	2,650
KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		%	100	100	100	100	100	100	50,244	170,000	172,870	180,158	183,372	756,644
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	%	25	25	25	25	25	25	17,779	113,150	31,921	32,870	33,847	229,567
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan									17,779	113,150	31,921	32,870	33,847	229,567
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1,790	1,000	1,050	1,070	1,100	6,010
1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1,790	1,000	1,050	1,070	1,100	6,010
2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	6	1	1	0	0	8	1,789	2,000	2,050	2,100	2,150	10,089
1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	6	1	1	0	0	8	1,789	2,000	2,050	2,100	2,150	10,089
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	3	2	1	14	4,500	92,250	9,471	9,800	9,647	125,668
1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	0	0	4	2,250	46,125	3,050	3,100	3,120	57,645
2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	3	2	2	1	10	2,250	46,125	6,421	6,700	6,527	68,023
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	1	2	9	1,800	4,000	3,600	3,700	3,800	16,900
1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	1	2	9	1,800	4,000	3,600	3,700	3,800	16,900
5	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan	Kesepakatan	4	13	10	2	2	31	3,800	6,600	7,700	7,900	8,600	34,600
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Dokumen	2	2	2	1	2	9	1,800	3,000	4,100	4,200	4,300	17,400
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Kesepakatan	4	13	10	2	2	31	2,000	3,600	3,600	3,700	4,300	17,200
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	800	1,050	1,100	1,150	4,100
1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	800	1,050	1,100	1,150	4,100
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	4	4	4	5	6	23	3,800	6,200	6,700	6,900	7,100	30,700
1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	4	4	4	5	6	23	3,800	6,200	6,700	6,900	7,100	30,700
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	1	1	1	0	0	3	300	300	300	300	300	1,500
1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	1	1	1	0	0	3	300	300	300	300	300	1,500

Sumber: Renstra Direktorat PPIJJ TA 2020-2024

Adapun target pencapaian sasaran Direktorat PPIJJ TA 2024 per masing-masing indikator jika disandingkan antara target kinerja pada Renstra TA 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja TA 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.13 Sandingan Target Kinerja Renstra Direktorat PPIJJ TA 2024 dengan Perjanjian Kinerja Direktorat PPIJJ TA 2024

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Renstra 2024	Target PK Revisi 2024
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25 %	25 %
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 NSPK	1 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6 Dokumen	14 Dokumen
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan sebagai perwujudan



Gambar III-1 Jalan Lintas Timur Sumatera - Riau

dari amanah yang tertuang dalam Permen PAN/RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dapat dilakukan melalui upaya strategis yang terarah dan terimplementasi. Direktorat PPIJJ telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja melalui pelaksanaan pelaporan dan pembahasan evaluasi kinerja secara berkala dan konsisten. Pada Tahun 2024 mekanisme pembahasan akuntabilitas evaluasi capaian kinerja dilakukan per triwulanan bersama mitra kerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja dilakukan per bulan (Laporan Monev Bulanan).

Penerapan Evaluasi AKIP tingkat Eselon II Tahun 2023 dilaksanakan pada Bulan Mei Tahun 2024, dimana Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (Direktorat PPIP) bertindak sebagai Evaluator Direktorat PPIJJ. Dari hasil pelaksanaan Evaluasi AKIP tersebut, Direktorat PPIJJ mendapatkan penilaian “**Memuaskan**” dengan perolehan nilai 83,35% dimana nilai tersebut naik dari perolehan pada Tahun 2023 (Evaluasi AKIP tingkat Eselon II Tahun 2022) yaitu sebesar 79,81%. Dari penerapan Evaluasi AKIP tersebut, rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Direktorat PPIJJ telah menindaklanjutinya. Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan SAKIP di Direktorat PPIJJ dijelaskan dalam tabel dibawah.

Tabel III.1 Tabel Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Atas Pelaksanaan SAKIP Tahun 2024 Direktorat PPIJJ

No.	Komponen/ Subkomponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tindak Lanjut
1. PERENCANAAN KINERJA				
a.	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	-	-	-
b.	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	-	-	-
c.	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinam-bungan	-	-	-
2. PENGUKURAN KINERJA				
a.	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	-	-	-
b.	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Belum terdapat legal SOP pengukuran kinerja (fisik)	Perlunya disusun SOP pengukuran kinerja untuk lingkup pekerjaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan oleh Unit Kerja Pemangku Penyusunan Strategi dan Kebijakan	Direktorat PPIJJ akan berkoordinasi dengan Direktorat PSSPP dan Setditjen PI terkait SOP pengukuran kinerja (capaian fisik) untuk lingkup pekerjaan di DJPI
c.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Pelaksanaan sosialisasi SKP terindikasi sudah dilakukan, namun tidak ada laporan lengkap.	Agar dilengkapi dengan dokumen pendukung resmi seperti Nota Dinas dan bukti dukung lainnya.	Pelaksanaan sosialisasi SKP di Direktorat PPIJJ saat ini masih mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Setditjen PI. Adapun pelaksanaan sosialisasi SKP di lingkup internal Direktorat PPIJJ masih bersifat informal, untuk kedepannya akan dilakukan secara formal agar terdapat bukti dukung yang lebih akurat seperti Nota Dinas yang disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi

No.	Komponen/ Subkomponen	Permasalahan	Rekomendasi Evaluator	Tindak Lanjut
3. PELAPORAN KINERJA				
a.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	Laporan Kinerja tidak disampaikan tepat waktu dan belum dilengkapi tanggal penyusunan sesuai Permen PUPR Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR.	Memastikan penyampaian laporan pada e-SAKIP tepat waktu (menghindari keterlambatan upload) dan mencantumkan tanggal pengesahan laporan untuk tidak terlambat atau melebihi batas waktu yang ditetapkan pada Permen PUPR No. 9 Tahun 2018.	Pada tahun berikutnya akan melakukan upload dokumen Laporan Kinerja pada aplikasi e-SAKIP tepat waktu dan melengkapi tanggal pengesahan Dokumen Laporan Kinerja sesuai Permen PUPR No 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR
b.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan /kegagalan kinerja serta Upaya perbaikan/ penyempurnaannya.	Laporan kinerja telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang namun belum disertai tanggal legalitas.	Menuliskan tanggal legalitas pada laporan kinerja yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.	Pada penyusunan Laporan Kinerja berikutnya, Direktorat PPIJJ akan mencantumkan tanggal legalitas
c.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	-	-	-
4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL				
a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	-	-	-
b.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	-	-	-
c.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	Tindak lanjut atas evaluasi AKIP 2022 belum tertuang dalam Nota Dinas atas pelaksanaan kegiatan pembahasan tindak lanjut rekomendasi AKIP	Menindaklanjuti secara menyeluruh terhadap hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja yang di dokumentasikan secara formal.	Direktorat PPIJJ telah melaksanakan pembahasan tindak lanjut atas evaluasi AKIP 2022. Adapun bukti dokumentasi seperti Nota Dinas juga telah disusun namun terjadi keterlambatan upload dikarenakan pengadministrasian yang kurang tertata dengan baik

3.2 Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan wujud dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi melalui sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara periodik dilaporkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang berisi ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas mengenai capaian atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian kinerja Direktorat PPIJJ dilaporkan pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan merupakan realisasi kinerja Direktorat PPIJJ Tahun Anggaran 2024.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ditegaskan bahwa upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja, instansi pemerintah diharuskan menyampaikan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah yang dihasilkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan metode perhitungan yang terdapat di dalam Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 – 2024 dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja berdasarkan target pada Renstra dengan kinerja yang telah dicapai Direktorat PPIJJ.

Cascading merupakan struktur penurunan program hingga paket kegiatan, struktur penurunan tersebut terdiri atas Sasaran Strategis (SS) yang diturunkan menjadi Sasaran Program (SP) yang dibagi menjadi beberapa Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) kemudian diturunkan kembali menjadi Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja (IKSK). Sasaran Kegiatan dan IKSK diturun menjadi beberapa Klasifikasi Rincian Out (KRO) yang diturunkan menjadi Rincian Output (RO) dengan Indikator Rincian Output. RO dan Indikator RO diturunkan menjadi Paket Kegiatan yang dilaksanakan. Berikut ini uraian Struktur *Cascading* Direktorat PPIJJ sesuai target yang harus dicapai berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan DIPA tahun 2024:

Tabel III.2 Cascading Direktorat PPIJJ Tahun 2024

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKK	Janis Indikator	KRO (Kode RO)	RO	Satuan	Target Renstra	Target DIPA Rev13	Target PK	Bobot RO
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya								
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan								
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan (50%)	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (ABF)	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	2	25%	20%
			Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	-	-		-
			Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1		30%
			Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2		30%
	Tingkat implementasi kegiatan transaksi paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan (50%)	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (AFA)	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	1	1		20%
		Kemitraan (AEE)	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	2	2		60%
		Layanan Manajemen Kinerja Internal (EBD)	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	6	14		40%

Sumber: Renja Dit. PPIJJ Tahun 2024

Berdasarkan rencana capaian kinerja yang telah dijelaskan pada tabel cascading diatas, berikut tabel pendetailan capaian ouput yang telah direalisasikan oleh Direktorat PPIJJ.

Tabel III.3 Pencapaian Kinerja Direktorat PPIJJ Berdasarkan RO

RO	Satuan	Target Renstra (Revisi)	Target DIPA Rev 13	Realisasi	Output
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	2	2	1. Renja dan Dokumen Pengaanggaran 2. Penerapan Pembangunan Zona Integritas di Direktorat PPIJJ
Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	<i>Final Business Case</i> (FBC) Proyek KPBU Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	1. Studi Kelayakan Proyek Prakarsa Badan Usaha Jalan Tol Pluit – Bandara (Bagian dari Jalan Tol Tomang – Pluit – Bandara (Elevated)) 2. Dokumen Pendukung Penyiapan Proyek KPBU Jalan Tol Malang-Kepanjen (Dokumen lingkungan dan Dokumen ANDALALIN)
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	2	2	4	1. Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi (PQ) 2. Flyover Sitingau Lauik (Bid Award) 3. Jalan Tol Betung – Jambi (PPJT) 4. Jalan Tol Palembang – Betung (PPJT)
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	1	1	7	1. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Indonesia telah diundangkan pada 25 Maret 2024 2. Dokumen Perjanjian Pengusahaan PBBL JTTS (Berita Acara Rencana Usaha pada Pengusahaan Jalan Tol Ruas Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi Nomor 05/BA/Dp/2024 tanggal 5 April 2024) 3. Keputusan Menteri PUPR Nomor 941/KPTS/M/2024 Tahun 2024 tentang Penugasan Kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Untuk Menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (ruas Kayuagung-Palembang, Palembang-Betung, dan Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi) 4. Keputusan Menteri Nomor 2790/KPTS/M/2024 tentang Rencana Umum Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Pembiayaan Kreatif Sektor Jalan Tol Tahun 2025-2029 tanggal 15 Oktober 2024 5. Keputusan Menteri PUPR Nomor 1307/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perencanaan dan Penyiapan Pengusahaan Jalan Tol tanggal 19 Juni 2024

RO	Satuan	Target Renstra (Revisi)	Target DIPA Rev 13	Realisasi	Output
					6. SE Dirjen PI No. 02/SE/Dp/2024 tentang Pedoman Penyusunan Kajian Studi Kelayakan Pengusahaan Jalan Tol tanggal 29 Februari 2024 7. SE Dirjen PI No. 04/SE/Dp/2024 tentang Pedoman Evaluasi Dokumen Studi Kelayakan Pengusahaan Jalan Tol tanggal 30 April 2024
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	6	14	14	1. Laporan Akhir Review Pelaksanaan Manajemen KPBU Sektor Jalan dan Jembatan (terdapat 9 Output) 2. Laporan Akhir Evaluasi Aspek Teknis Proyek KPBU Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) 3. Laporan Akhir Evaluasi Manfaat dan Dampak Hasil Pembangunan Proyek Infrastruktur Jalan Tol Pekanbaru-Dumai 4. Laporan Akhir Evaluasi Manfaat dan Dampak Hasil Pembangunan Proyek Infrastruktur Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Trans Jawa) 5. Laporan Akhir Kajian Rumusan Skema Pembiayaan Melalui Instrumen Pengembangan Kawasan Pada Proyek KPBU Jalan Tol Waru-Juanda, Jalan Tol Surabaya-Gresik, Jalan Tol Surabaya-Gempol, dan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto 6. Laporan Akhir Pemantauan dan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP)

Atas pencapaian tersebut, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mampu memenuhi jumlah target output pada masing-masing Rincian Output (RO) yang telah ditargetkan pada Renstra maupun DIPA TA 2024. Adapun untuk RO “Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan” dan “NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan” mampu melebihi target output yang telah ditetapkan.

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja

Direktorat PPIJJ mendukung pencapaian Program Dukungan Manajemen khususnya mendukung tercapainya **IKSP Tingkat Ketersediaan KPBUI Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif**. Dalam hal ini, Direktorat PPIJJ berkontribusi melalui pelaksanaan proyek infrastruktur jalan dan jembatan. Capaian kinerja Direktorat PPIJJ pada tahun 2024 berdasarkan PK adalah sebesar 26,38%. Rincian Capaian IKK Direktorat PPIJJ dapat dilihat pada tabel IV.4.

Tabel III.4 Capaian Kinerja Direktorat PPIJJ TA 2024

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKK	Janis Indikator	KRO (Kode RO)	RO	Satuan	Target Renstra	Target DIPA Rev 13	Target PK (%)	Bobot RO (%)	Realisasi Capaian RO	Realisasi Capaian RO (dalam 100 %)	Realisasi Capaian RO (dalam 25 %)	Total Capaian PK (%)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya												
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan												
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan (50%)	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (ABF)	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	2	25%	10%	2	10%	2,5%	26,38%
			Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	-	-		-	-	-		
			Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1		15%	1	15%	3,75%	
			Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2		15%	2	16,05%	4,01%	

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKK	Janis Indikator	KRO (Kode RO)	RO	Satuan	Target Renstra	Target DIPA Rev 13	Target PK (%)	Bobot RO (%)	Realisasi Capaian RO	Realisasi Capaian RO (dalam 100 %)	Realisasi Capaian RO (dalam 25 %)	Total Capaian PK (%)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya												
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan												
		Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (AFA)	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	1	1		10%	7	11,5%	2,88%	
	Tingkat implementasi kegiatan transaksi paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan (50%)	Kemitraan (AEE)	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	2	2		30%	4	33%	8,25%	
		Layanan Manajemen Kinerja Internal (EBD)	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	6	14		20%	14	20%	5%	

Direktorat PPIJJ berhasil mencapai nilai IKK sebesar 26,38% dimana capaian tersebut melebihi target capaian IKK yang telah ditetapkan yaitu sebesar 25%.

Pelaksanaan monitoring kinerja realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PPIJJ Tahun 2024 melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan proyek atau program. Proses ini mencakup analisis data, perbandingan dengan target yang telah ditetapkan, dan identifikasi potensi perbaikan. Berikut disajikan tabel informasi target, realisasi, dan kinerja pada indikator kinerja selama kegiatan TA 2024:

Tabel III.5 Target, Realisasi, dan Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PPIJJ TA 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan													
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Target	0.13%	0.68%	1.58%	2.20%	4.80%	5.31%	8.73%	10.81%	15.55%	17.63%	19.39%	25.00%
	Realisasi	0.15%	0.80%	1.61%	2.56%	5.61%	6.40%	8.82%	11.99%	15.60%	18.79%	22.60%	26.38%
	Kinerja	115.38 %	117.65 %	101.90 %	116.36 %	116.88 %	120.52 %	101.03 %	110.92 %	100.32 %	106.57 %	116.55 %	105.52 %

Keterangan nilai capaian kinerja kegiatan berdasarkan Aplikasi e-Monitoring SAKIP

Kinerja <60	61< kinerja <69	70< kinerja <89	90< kinerja <100	kinerja >100
Sangat Kurang	Kurang	Butuh Perbaikan	Baik	Istimewa

IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Selama Tahun 2024, akumulasi realisasi capaian indikator kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktorat PPIJJ) pada **IKK Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan** adalah sebesar 26,38% dimana nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 25,00% dengan nilai kinerja pencapaian IKK adalah 105,52%.

3.2.2 Capaian Kinerja Paket Pembiayaan Proyek KPBU Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2024

Direktorat PPIJJ mengemban tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. Pelaksanaan tugas penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan dilaksanakan dalam bentuk Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dan Jumlah Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan. Adapun untuk proyek KPBU dengan skema pengembalian tarif (sektor Jalan Tol), Direktorat PPIJJ berwenang untuk menyiapkan dokumen perencanaan

hingga tahap transaksi. Selanjutnya kewenangan untuk melaksanakan pelelangan berpindah ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Evaluasi terhadap capaian pelaksanaan paket pembiayaan KPBU di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) dikoordinasi oleh Direktorat Strategi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembiayaan (Direktorat PSSPP). Berdasarkan hasil kesepakatan, capaian paket yang dihitung atas progres pengusahaan proyek KPBU adalah Studi Pendahuluan/Pra FS, OBC, FBC (FS) pada tahap perencanaan dan penyiapan, sedangkan untuk proyek siap dikerjasamakan adalah proyek yang minimal telah melaksanakan tahapan prakualifikasi.

3.2.2.2 Capaian Kinerja Paket Pembiayaan Kreatif Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahap Penyiapan Tahun 2024

Berdasarkan Dokumen Berita Acara Kesepakatan DJPI No. 19/BA/Dp/2024, dari total target 24 proyek KPBU pada tahap perencanaan dan penyiapan di DJPI tahun 2024, Direktorat PPIJJ mampu merealisasikan sebanyak 3 dari 8 proyek yang ditargetkan sesuai PK Direktorat PPIJJ. Adapun Capaian Paket Pembiayaan Proyek KPBU sektor Jalan dan Jembatan tahap perencanaan dan penyiapan yang dilaksanakan oleh Direktorat PPIJJ pada TA. 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III.6 Capaian Proyek KPBU Tahap Penyiapan Sektor Jalan dan Jembatan TA 2024

TARGET	REALISASI		
JUMLAH PROYEK	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	TAHAPAN
8	3	Jalan Tol Sukabumi – Ciranjang	Penyiapan
		Jalan Tol Malang – Kepanjen	Penyiapan
		Jalan Tol Pluit – Bandara (Bagian dari Jalan Tol Tomang – Pluit – Bandara (<i>Elevated</i>))	Penyiapan

3.2.2.2 Capaian Kinerja Paket Pembiayaan Kreatif Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Siap Dikerjasamakan Tahun 2024

Berdasarkan Dokumen Berita Acara Kesepakatan DJPI No. 19/BA/Dp/2024, dari total target 8 proyek yang siap dikerjasamakan di DJPI tahun 2024, Direktorat PPIJJ mampu merealisasikan sebanyak 4 dari 2 proyek yang ditargetkan sesuai PK Direktorat PPIJJ. Adapun Capaian Paket Pembiayaan Proyek KPBU sektor Jalan dan Jembatan Siap Dikerjasamakan yang dilaksanakan oleh Direktorat PPIJJ pada TA. 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III.7 Capaian Proyek KPBUs yang Siap Dikerjasamakan Sektor Jalan dan Jembatan TA 2024

TARGET DIPA DJPI TA. 2024		REALISASI				
JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI (Juta Rupiah)	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI (Juta Rupiah)		TAHAPAN
2	28.210.000	4	Flyover Sitinjau Lauik	2.793.000	64.190.000	Bid Award
			Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi	25.404.000		Prakualifikasi (PQ)
			Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi	21.012.000		PPJT
			Jalan Tol Palembang – Betung	14.981.000		PPJT

Faktor keberhasilan

Faktor keberhasilan Direktorat PPIJJ mampu merealisasikan 4 (empat) proyek dari target 2 (dua) proyek yang siap dikerjasamakan yaitu:

1. Proyek *Flyover* Sitinjau Lauik telah ditetapkan Penunjukan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor PB 0201-Mn/1031 tanggal 1 November 2024 dengan pemenang lelang yaitu Konsorsium PT. Utama Karya (Persero) dan PT. Utama Karya Infrastruktur. Pada tahun 2025 ditargetkan dapat dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama.
2. Pada pertengahan tahun 2024, proses Prakualifikasi Proyek Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi dinyatakan gagal (gagal lelang) karena tidak menghasilkan badan usaha yang memenuhi kualifikasi. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat PPIJJ melakukan revaluasi terhadap rencana pengusahaan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, dan pada September 2024 Proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi berhasil dilakukan Prakualifikasi kembali dan saat ini sedang dilakukan pemasukan dokumen isian Prakualifikasi.
3. Menteri PUPR telah menerbitkan surat Penetapan Rencana Usaha Pengusahaan Jalan Tol Ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi kepada PT. Utama Karya (Persero) melalui surat Nomor BM 0701-Mn/239 pada tanggal 5 April 2024 dan telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada tanggal 3 Juni 2024.
4. Menteri PUPR telah menerbitkan surat Penetapan Rencana Usaha Pengusahaan Jalan Tol Palembang – Betung kepada PT. Utama Karya (Persero) melalui surat Nomor BM 0701-Mn/855 pada tanggal 20 September 2024 dan telah dilaksanakan

Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada tanggal 30 September 2024.

Permasalahan

Meskipun Direktorat PPIJJ dapat melebihi capaian indikator kinerja yang telah ditargetkan, masih terdapat beberapa isu maupun permasalahan dalam pelaksanaan penyiapan diantaranya:

1. Masih terdapat beberapa progres proyek prakarsa badan usaha yang tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan sampai dengan Desember 2024, diantaranya:
 - a. Perolehan Izin Prinsip Proyek Jalan Tol Caringin – Cisarua (Bagian dari Jalan Tol Caringin – Cianjur) karena berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan hasil bahwa kemampuan keuangan dari calon pemrakarsa dinyatakan belum layak;
 - b. Perolehan Izin Prakarsa Proyek Jalan Tol Pluit – Bandara (Bagian dari Jalan Tol Tomang – Pluit – Bandara (Elevated)) karena masih dalam proses evaluasi akhir dokumen proposal proyek prakarsa oleh DJBM dan DJPI;
 - c. Pencabutan Izin Prinsip Proyek Jalan Tol Cilegon – Anyer dikarenakan calon pemrakarsa belum menyerahkan Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Pendukung sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - d. Pemrakarsa Jalan Tol Kohod (Paku Haji) – Lebakwangi (Neglasari) masih belum menyampaikan hasil perbaikan studi kelayakan sesuai dengan trase yang terpilih kepada DJPI.
2. Terjadinya gagal lelang (Prakualifikasi dinyatakan gagal) pada proyek *solicited* yaitu Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi dan Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Ciamis dikarenakan tidak menghasilkan badan usaha yang memenuhi kualifikasi, sehingga Direktorat PPIJJ melakukan revaluasi kembali terhadap rencana pengusahaan jalan tol. Sampai dengan akhir tahun 2024, hanya Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi yang dapat melakukan Prakualifikasi kembali, sedangkan Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Ciamis masih dalam proses revaluasi dokumen penyiapan lelang (studi kelayakan) terhadap lingkup pengusahaan sebelumnya Gedebage-Ciamis menjadi Gedebage-Tasikmalaya sehingga pelaksanaan Prakualifikasi ulang tidak tercapai pada tahun 2024.
3. Terdapat beberapa progres proyek yang ditunda karena masih membutuhkan arahan dari pimpinan.

3.3 Analisis Perbandingan Kinerja

3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel III.8 Perbandingan Kinerja Direktorat PPIJJ dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis (SS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja SP (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK (2020-2024) (%)	Realisasi (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen										
Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25	25	25	25	25	26,38

Capaian IKK Direktorat PPIJJ dari tahun 2020-2024 selalu mencapai target IKK yang telah ditentukan yaitu sebesar 25%, Adapun untuk tahun 2024, capaian IKK Direktorat PPIJJ dapat melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 26,38%.

3.3.2 Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang salah satunya adalah “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional salah satunya melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat PPIJJ, khususnya terkait konektivitas jalan.

Dalam RPJMN 2020 – 2024, Kementerian PUPR ditargetkan terbangunnya Jalan Tol Baru dan/atau Beroperasi sepanjang 2.500 km, Jalan Nasional Baru sepanjang 3.000 km dan terciptanya Kondisi Mantap Jalan Nasional sebesar 97%. Dalam mendukung target tersebut,

dibutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp 573 Triliun dimana APBN hanya mampu mengalokasikan sebesar Rp 203 Triliun, sehingga terdapat *funding gap* sebesar Rp 370 Triliun. Salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pencapaian kinerja realisasi Proyek KPBU di Direktorat PPIJJ yang siap dikerjasamakan dari tahun 2020 hingga 2024 telah menunjukkan kemajuan signifikan khususnya sektor jalan dan jembatan. Melalui serangkaian proyek yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PPIJJ, realisasi total capaian kinerja proyek KPBU sektor jalan dan jembatan yang siap dikerjasamakan sampai dengan tahun 2024 ini terbilang cukup baik. Berikut realisasi capaian kinerja proyek KPBU sektor jalan dan jembatan periode 2020-2024:

Tabel III.9 Realisasi Capaian Kinerja Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan Periode 2020-2024

No	Nama Proyek	Nilai Investasi
Tahun 2020		Rp 63.481.300.000.000
1	Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Provinsi Riau	Rp 585.300.000.000
2	Jalan Tol Layang Cikunir-Karawaci	Rp 26.150.000.000.000
3	Sistem Transaksi Tol Non-Tunai Nirsentuh Berbasis <i>Multi Lane Free Flow</i> (MLFF)	Rp 2.920.000.000.000
4	Jalan Tol Semarang Harbour	Rp 12.130.000.000.000
5	Penggantian Dan/Atau Duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa	Rp 2.336.000.000.000
6	Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi	Rp 19.360.000.000.000
Tahun 2021		Rp 168.701.000.000.000
1	Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat	Rp 15.375.000.000.000
2	Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung	Rp 8.947.000.000.000
3	Jalan Tol Semanan-Balaraja	Rp 17.680.000.000.000
4	Jalan Tol Kediri-Tulungagung	Rp 10.490.000.000.000
5	Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg	Rp 18.620.000.000.000
6	Jalan Tol Akses Patimban	Rp 8.480.000.000.000
7	Jalan Tol JORR <i>Elevated</i> Ruas Cikunir-Ulujami	Rp 21.565.000.000.000
8	Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap	Rp 57.590.000.000.000
9	Jalan Tol Malang-Kepanjen	Rp 9.954.000.000.000
Tahun 2022		Rp 181.173.460.000.000
1	Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena (Segmen Mamberamo – Elelim)	Rp 3.116.460.000.000
2	Jalan Akses Exit Toll	Rp 7.900.000.000.000
3	Jalan Tol Cilacap - Yogyakarta	Rp 53.777.000.000.000
4	Jalan Tol Demak - Tuban	Rp 56.580.000.000.000

No	Nama Proyek	Nilai Investasi
5	Jalan Tol Ngawi - Babat	Rp 16.830.000.000.000
6	Jalan Tol Jember - Lumajang	Rp. 7.400.000.000.000
7	Jalan Tol Jember - Situbondo	Rp 10.290.000.000.000
8	Jalan Tol Tulungagung - Kepanjen	Rp 14.520.000.000.000
9	Jembatan Tanah Bumbu - Pulau Laut	Rp 2.460.000.000.000
10	Jembatan Muna - Buton	Rp 8.300.000.000.000
Tahun 2023		Rp 135.750.000.000.000
1	Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis	Rp 37.147.000.000.000
2	Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik	Rp 23.332.000.000.000
3	Jalan Tol Demak-Tuban	Rp 49.607.000.000.000
4	Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi	Rp 22.840.000.000.000
5	Fly Over Sitinjau Lauik	Rp 2.824.000.000.000
Tahun 2024		Rp 64.186.000.000.000
1	<i>Fly Over Sitinjau Lauik</i>	Rp 2.793.000.000.000
2	Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi	Rp 25.400.000.000.000
3	Jalan Tol Betung – Jambi	Rp 21.012.000.000.000
4	Jalan Tol Palembang – Betung	Rp 14.981.000.000.000
TOTAL		Rp 613.291.760.000.000

3.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (*Benchmarking*)

Perbandingan kinerja dengan standar nasional dilaksanakan dengan membandingkan kinerja antara Kementerian PUPR dengan instansi pemerintah lainnya yang terlibat dalam proses KPBU meskipun dengan fokus dan tanggung jawab yang berbeda seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam keterlibatan pelaksanaan proses KPBU, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan LKPP memiliki peran yang penting dan strategis, namun pada instansi tersebut tidak menjadikan capaian KPBU sebagai salah satu target kinerja utama karena lebih berfokus pada pengaturan kebijakan dan koordinasi dibandingkan dengan implementasi langsung proyek KPBU. Sementara itu, Direktorat PPIJJ sebagai salah satu Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) di Kementerian PUPR secara langsung terlibat dalam pelaksanaan proyek KPBU khususnya di sektor jalan dan jembatan sehingga memiliki target kinerja yang lebih berkaitan langsung dengan realisasi proyek KPBU. Berikut beberapa perbandingan kinerja dengan standar nasional yang memiliki kesamaan dengan Direktorat PPIJJ.

Tabel III.11 Target Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1 SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	75	80	85	90	95
		Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	85%	87,5%	90%	92,5%	95%
	2 SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	80-83,9%	84-87,9%	88-91,9%	92-95,9%	96-100%
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	3 SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	3.1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	85-87,9%	88-90,9%	91-93,9%	94-96,9%	97-100%
		3.2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	75-79,9%	80-84,9%	85-89,9%	90-94,9%	95-100%
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	4 SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	83,00	86,00	90,00	90,50	91,00
		b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	85	88	90	92	95
		c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	85%	88%	90%	92%	95%

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Tabel III.10 Target Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan							
	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Rasio Defisit terhadap PDB	(5,07%)	(3,21%)- (4,17%)	(2,79%)- (3,55%)	(2,35%)- (2,72%)	(2,19%)- (2,51%)	Kemenkeu (penyedia data: BKF)
		Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	75	75	75	75	75	Unit Eselon I terkait
2	Penerimaan negara yang optimal							
	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal	Rasio perpajakan terhadap PDB	8,51% - 8,69%	8,25%- 8,63%	8,27%- 8,70%	8,38%- 9,09%	8,59%- 9,55%	Kemenkeu (penyedia data: BKF)
		Persentase realisasi penerimaan Negara	100%	100%	100%	100%	100%	DJP, DJBC, DJA
		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	53,5%	63%	64%	65%	66%	DJP, DJBC

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pengelolaan belanja negara yang berkualitas							
	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	Indeks kualitas belanja pemerintah	80	81	82	83	84	DJA, DJPK
		Indeks ketimpangan antarwilayah	0,245 (skala 1)	0,242 (skala 1)	0,240 (skala 1)	0,235 (skala 1)	0,232 (skala 1)	DJPK
		Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	22,94%	25,94%	28,94%	31,94%	34,94%	DJPK
4	Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali							
	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3,10 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,20 (skala 4)	DJPb, DJPPR
		Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	DJPb, ITJEN
		Nilai kinerja anggaran K/L	80,2	81,2	81,2	82,2	82,2	DJPb, DJA
		Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	91%	92%	93%	94%	95%	DJPb
	Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	55%	57%	60%	65%	70%	DJKN
		Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	DJKN, DJPPR, DJPb
	Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali	Imbal Hasil (Yield) Surat Berharga Negara	Naik	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	DJPPR
		Rasio Utang terhadap PDB	36,38%	36,67%-37,97%	36,65%-37,39%	36,45%-37,36%	36,08%-37,18%	Kemenkeu (penyedia data: BKF)
		Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	100%	100%	100%	100%	DJPPR

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				UIC	
			2020	2021	2022	2023		2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien							
	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	4 (skala 5)	4,05 (skala 5)	4,10 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,20 (skala 5)	Seluruh UE I, (Setjen c.q. Biro Organta Penyedia Data)
		Persentase penyelesaian <i>delayering</i>	100%	100%	100%	-	-	Setjen dan UE I Terkait
		Tingkat kualitas pengelolaan SDM Kementerian Keuangan	-	88,2%	89,0%	89,8%	90,5%	Setjen (Biro SDM Penyedia Data)
		Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	75%	77%	80%	82%	85%	Seluruh UE I (BPPK Penyedia Data)
		Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	90%	80%	82%	85%	87%	BPPK
		Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal BAIK	90%	93%	-	-	-	BPPK
		Persentase pemenuhan <i>gap</i> kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI)	-	-	90%	92%	94%	BPPK
	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	Seluruh UE I Terkait (Setjen c.q. Pusintek Penyedia Data)
		Persentase penyelesaian proyek strategis TIK*	85%	87%	90%	92%	95%	Seluruh UE I Terkait, (Setjen c.q. Pusintek sebagai Penyedia Data)
	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks integritas	90 (skala 100)	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)	Seluruh UE I Terkait (Itjen

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Penyedia Data)
		Indeks opini BPK atas LK BA 015	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Setjen, Itjen
	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	96,87	100	100	100	100	BLU Pengelola Dana dan SMV terkait
		<i>Dwelling time</i>	3,6 hari - 2,9 hari	3,5 hari - 2,9 hari	3,4 hari - 2,9 hari	3,3 hari - 2,9 hari	3,2 hari - 2,9 hari	LNSW

Sumber: Renstra Kementerian keuangan Tahun 2020-2024

3.4 Analisis Realisasi Anggaran

3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Selama tahun 2024, DIPA TA 2024 telah dilakukan revisi sebanyak 13 kali. Mengacu pada DIPA TA 2024 Revisi ke-13 Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2024 tanggal 2 Desember 2024, total pagu anggaran Direktorat PPIJJ Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 16.151.412.000,-. Pada tahun 2024, realisasi keuangan Direktorat PPIJJ sebesar Rp. 15.974.598.000,-.

3.4.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan data *e-Monitoring Online* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, status tanggal 13 Januari 2025, realisasi keuangan Tahun Anggaran 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 15.974.598.000,- dari total pagu anggaran sebesar Rp 16.151.412.000,- dengan persentase capaian keuangan sebesar 98,90% dan capaian fisik sebesar 100,00%. Berikut rincian capaian realisasi anggaran Direktorat PPIJJ Tahun Anggaran 2024.

Tabel III.12 Capaian Realisasi Anggaran Direktorat PPIJJ pada Tahun Anggaran 2024

Kode	Subdit / Paket	Pagu	Realisasi	Desember 2024			
				Keu. (%)		Fis. (%)	
				Renc.	Real.	Renc.	Real.
Direktorat Pelaksanan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		16.151.412	15.974.598	100,00%	98,90%	100,00%	100,00%
Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi							
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana						

Kode	Subdit / Paket	Pagu	Realisasi	Desember 2024			
				Keu. (%)		Fis. (%)	
				Renc.	Real.	Renc.	Real.
4197.ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.041.785	959.783	100,00%	92,13%	100,00%	100,00%
051.A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.041.785	959.783	100,00%	92,13%	100,00%	100,00%
4197.ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.479.351	3.479.351	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
054.A	Penyusunan Dokumen Pendukung <i>Final Business Case</i> (FBC) Proyek KPBU Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang	3.479.351	3.479.351	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4197.ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.413.466	3.377.215	100,00%	98,60%	100,00%	100,00%
051.A	Fasilitasi Percepatan Penyiapan Dokumen Pendukung Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1.291.789	1.255.539	100,00%	97,19%	100,00%	100,00%
051.A	Penyusunan Dokumen Pendukung Penyiapan Proyek KPBU Jalan Tol Malang-Kepanjen	2.121.677	2.121.677	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria						
4197.AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.758.790	1.758.586	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%
051.A	Penyusunan NSPK Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.758.790	1.758.586	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%
Subdirektorat Koordinasi Rencana Investasi							

Kode	Subdit / Paket	Pagu	Realisasi	Desember 2024			
				Keu. (%)		Fis. (%)	
				Renc.	Real.	Renc.	Real.
4197.ABF	Kemitraan						
4197.AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.553.000	2.524.758	100,00%	98,89%	100,00%	100,00%
051.A	Pelaksanaan <i>Market Sounding</i> Proyek Sektor Jalan dan Jembatan	758.000	746.000	100,00%	98,42%	100,00%	100,00%
052.A	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Flyover Sitinjau-Lauik	1.086.000	1.082.874	100,00%	99,71%	100,00%	100%
052.B	Fasilitasi Pembentukan Badan Penyiapan dan Konsep Pembentukan Panel Badan Usaha Jalan dan Jembatan	709.000	695.884	100,00%	98,15%	100,00%	100,00%
4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal						
4197.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.905.020	2.876.916	100,00%	99,03%	100,00%	100,00%
053.A	Evaluasi Manfaat dan Dampak Hasil Pembangunan Proyek Infrastruktur Jalan Tol Pekanbaru-Dumai	237.000	236.612	100,00%	99,84%	100,00%	100,00%
053.B	Kajian Rumusan Skema Pembiayaan Melalui Instrumen Pengembangan Kawasan Pada Proyek KPBU Jalan Tol Waru-Juanda, Jalan Tol Surabaya-Gresik, Jalan Tol Surabaya-Gempol, dan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto	237.000	233.741	100,00%	98,62%	100,00%	100,00%
053.C	Evaluasi Manfaat dan Dampak Hasil Pembangunan Proyek Infrastruktur Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Trans Jawa)	237.000	236.532	100,00%	99,80%	100,00%	100,00%

Kode	Subdit / Paket	Pagu	Realisasi	Desember 2024			
				Keu. (%)		Fis. (%)	
				Renc.	Real.	Renc.	Real.
053.D	Pemantauan dan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	210.000	209.999	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
053.F	Review Pelaksanaan Manajemen KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1.534.020	1.534.020	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
053.G	Evaluasi Aspek Teknis Proyek KPBU Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR)	450.000	426.012	100,00%	94,67%	100,00%	100,00%
4197.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4197.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.000.000	997.747	100,00%	99,77%	100,00%	100,00%
002.N	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIJJ	1.000.000	997.747	100,00%	99,77%	100,00%	100,00%

Sumber: e-monitoring Kementerian PUPR

Keterangan:

- Berdasarkan *e-Monitoring Online* per tanggal 07 Oktober 2024, Pagu Direktorat PPIJJ mengalami perubahan yang semula sebesar Rp 16.271.412.000,- menjadi sebesar Rp 16.151.412.000,-
- Berdasarkan *e-Monitoring Online* per tanggal 30 November 2024, terdapat beberapa paket kegiatan dengan pagu yang telah diblokir antara lain:
 - Paket Kegiatan **"Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan"** sebesar Rp 82.000.000,-
 - Paket Kegiatan **"Fasilitasi Percepatan Penyusunan Dokumen Pendukung Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan"** sebesar Rp 35.000.000,-
 - Paket Kegiatan **"Pelaksanaan Market Sounding Proyek Sektor Jalan dan Jembatan"** sebesar Rp 11.900.000,-
 - Paket Kegiatan **"Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Flyover Sitinjau-Lauik"** sebesar Rp 2.000.000,-
 - Paket Kegiatan **"Fasilitasi Pembentukan Badan Penyusunan dan Konsep Pembentukan Panel Badan Usaha Jalan dan Jembatan"** sebesar Rp 13.100.000,-
 - Paket Kegiatan **"Kajian Rumusan Skema Pembiayaan Melalui Instrumen Pengembangan Kawasan Pada Proyek KPBU Jalan Tol Waru-Juanda, Jalan Tol Surabaya-Gresik, Jalan Tol Surabaya-Gempol, dan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto"** sebesar Rp 2.500.000,-
 - Paket Kegiatan **"Evaluasi Aspek Teknis Proyek KPBU Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR)"** sebesar Rp 23.824.000,-
 - Paket Kegiatan **"Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIJJ"** sebesar Rp 2.000.000,-

Persentase capaian keuangan Tahun Anggaran 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebesar 98,90% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar 98,82%.

Adapun rencana dan realisasi kinerja keuangan serta fisik Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Tahun Anggaran 2024 digambarkan melalui Kurva S sebagai berikut



Gambar III-2 Kurva S Rencana dan Realisasi Keuangan



Gambar III-3 Kurva S Rencana dan Realisasi Fisik

3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Berikut disajikan perbandingan antara kinerja penyerapan anggaran pada TA 2024 dengan kinerja penyerapan anggaran pada TA 2023.

Tabel III.13 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Rincian Output	Tahun Anggaran 2023			Tahun Anggaran 2024		
	Pagu (Ribu Rp)	Realisasi		Pagu (Ribu Rp)	Realisasi	
		Dalam Ribu Rupiah	Persentase (%)		Dalam Ribu Rupiah	Persentase (%)
Direktorat PPIJJ	32.585.068	31.674.353	98,82%	16.151.412	15.974.598	98,90%
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	570.000	559.015	98,07%	1.041.785	959.783	92,13%
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	23.405.269	23.116.200	98,76%	3.479.351	3.479.351	100,00%
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.680.000	1.671.016	99,47%	3.413.466	3.377.215	98,60%
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.479.799	1.467.016	99,14%	1.758.790	1.758.586	99,99%
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	3.250.000	3.216.974	98,98%	2.553.000	2.524.758	98,89%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.200.000	1.179.891	98,32%	2.905.020	2.876.916	99,03%
Layanan Perkantoran	1.000.000	990.588	99,06%	1.000.000	997.747	99,77%

Secara umum penyerapan anggaran TA 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,08% jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran TA 2023.

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sepanjang tahun 2024, Direktorat PPIJJ mengupayakan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja melalui:

1. Direktorat PPIJJ melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan *Self-Blocking* sehubungan dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan No. S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. Meskipun Direktorat PPIJJ

melakukan efisiensi anggaran, namun capaian kinerja Direktorat PPIJJ mampu melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Selama tahun 2024, terdapat perubahan struktur pegawai yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pegawai di Direktorat PPIJJ dengan rincian sebagai berikut:
 - Pegawai yang sedang melakukan karya siswa sebanyak 1 (satu) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil;
 - Pegawai yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) sebanyak 1 (satu) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil; dan
 - Pegawai yang ditugaskan ke unit kerja/unit organisasi lain sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

berkurangnya sumber daya manusia tersebut tidak mengganggu jalannya kinerja organisasi, hal ini dikarenakan adanya arahan pimpinan untuk mengoptimalkan pegawai yang ada sehingga capaian kinerja Direktorat PPIJJ mampu melebihi dari target yang telah ditetapkan.

3. Efisiensi pelaksanaan rapat dilakukan oleh Direktorat PPIJJ dengan melaksanakan kegiatan rapat melalui aplikasi seperti *Zoom*, *Google Meet*, *Microsoft Team*, dsb,
4. Penggunaan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) versi terbaru bagi seluruh pegawai Kementerian PUPR secara optimal, sehingga memudahkan pimpinan dalam memberikan disposisi sehingga dapat mengurangi penggunaan ATK.

3.6 Analisis Pemanfaatan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Analisa terkait pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja bertujuan untuk peningkatan kinerja serta perubahan budaya kinerja organisasi ke depannya. Selain itu, informasi yang tertuang dalam laporan kinerja juga dapat mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta dapat menjadi acuan dalam menyusun perencanaan pada kegiatan ditahun selanjutnya. Berikut beberapa analisa pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja di Direktorat PPIJJ.

3.6.1 Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja khususnya pada capaian kinerja dan isu-isu strategis dalam penyiapan proyek sektor jalan dan jembatan menjadi perhatian bagi seluruh pegawai dan pimpinan di lingkungan Direktorat PPIJJ. Berikut beberapa kegiatan serta dokumentasi yang menggambarkan keterlibatan langsung pimpinan dalam pencapaian kinerja.

1. Rapat Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja TA. 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan hasil Capaian Kinerja pada Tahun 2024 (capaian kinerja per triwulanan) oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan periode berikutnya.



Gambar III-4 Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja TA. 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

2. Rapat Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ("AKIP") Direktorat PPIJJ TA 2023

Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP Direktorat PPIJJ serta membahas strategi peningkatan nilai evaluasi AKIP pada periode berikutnya.



Gambar III-5 Dokumentasi Rapat Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ("AKIP") Direktorat PPIJJ TA 2023

3.6.2 Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja

Setiap pegawai Direktorat PPIJJ memiliki atensi yang cukup tinggi terhadap informasi dalam laporan kinerja karena menyadari pentingnya data dan informasi yang akurat untuk evaluasi kinerja dan perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Mengingat pentingnya informasi dalam laporan kinerja, maka dibutuhkan kompetensi pegawai dalam menyusun laporan kinerja akurat dan akuntabel. Bentuk kepedulian pegawai Direktorat PPIJJ dalam menyajikan informasi kinerja di dalam laporan kinerja salah satunya yaitu keikutsertaan pegawai Direktorat PPIJJ dalam Pelatihan Strategi Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP) yang diselenggarakan pada tanggal 27-30 Maret 2024 dengan total 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran.

Adapun pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan tersebut adalah pegawai yang bertugas dalam penyusunan laporan kinerja ataupun kegiatan yang terkait penyelenggaraan SAKIP di Direktorat PPIJJ yaitu sebanyak 5 (lima) pegawai. Berikut bukti dukung (Sertifikat Kelulusan) keikutsertaan pegawai Direktorat PPIJJ dalam Pelatihan Strategi Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar III-6 Bukti Dukung Sertifikat Kelulusan Pelatihan Strategi Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.6.3 Analisis Penyesuaian Aktifitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala

Penyusunan data dan informasi dalam capaian kinerja Direktorat PPIJJ dilakukan secara berkala mulai dari evaluasi mingguan yang disajikan kedalam Laporan Mingguan dan evaluasi bulanan yang disusun dalam bentuk Laporan Bulanan, dimana hasil penyusunan laporan tersebut disampaikan ke pimpinan. Khusus untuk Laporan Bulanan, setelah laporan

tersebut disetujui dan disahkan oleh pimpinan, maka selanjutnya dilakukan *upload* pada aplikasi e-Sakip. Selain itu, aktifitas yang dilakukan Direktorat PPIJJ untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi dengan melaksanakan rapat pembahasan capaian kinerja secara triwulanan untuk dapat mengukur kinerja baik dari aspek pencapaian proyek maupun kinerja anggaran.



Gambar III-7 Bukti Dukung Penyusunan Laporan Mingguan dan Bulanan Secara Berkala dan Pelaksanaan Rapat Kinerja Triwulanan

3.6.4 Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala

Analisa penggunaan informasi di dalam laporan kinerja berkala yang dimanfaatkan untuk penyesuaian penggunaan anggaran guna mencapai kinerja tahunan dapat dilihat melalui DIPA dan perubahannya sebagaimana revisi DIPA dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali, serta perhitungan terkait usulan revisi anggaran sebagai berikut.

The image displays three official documents from the Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia. The top-left document is a 'Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat' (Minister's Decision) regarding the approval of the 2024 budget. The top-right document is a 'Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat' (Secretary's Decision) regarding the approval of the 2024 budget. The bottom document is a 'Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat' (Minister's Decision) regarding the approval of the 2024 budget. The documents are dated 12 June 2024 and 13 June 2024.

Gambar III-8 Bukti Dukung DIPA TA 2024 dan Usulan Kebutuhan Penambahan Anggaran Direktorat PPIJJ

Dalam laporan kinerja disajikan informasi terkait capaian penggunaan anggaran termasuk apabila terdapat perubahan pagu anggaran. Hal tersebut dapat dijadikan analisis ataupun masukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran untuk periode selanjutnya. Informasi terkait capaian penggunaan anggaran telah disajikan oleh Direktorat PPIJJ dalam laporan mingguan, laporan movev bulanan, serta laporan kinerja.

3.6.5 Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Analisa pemanfaatan informasi di dalam laporan kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian keberhasilan kinerja tahunan dapat dilihat melalui capaian IKK yang diperoleh unit kerja setiap tahunnya kemudian dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja (PK), dimana target IKK Direktorat PPIJJ selama periode Renstra TA 2020-2024 adalah sebesar 25%. Berikut Capaian IKK Direktorat PPIJJ periode Renstra TA 2020-2024:

Tabel III.14 Bukti Dukung Capaian Keberhasilan Kinerja Direktorat PPIJJ

Sasaran Strategis (SS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja SP (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK (2020-2024) (%)	Realisasi (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen										
Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25	25	25	25	25	26,38

Capaian IKK dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi pencapaian keberhasilan kinerja tahunan, dimana Direktorat PPIJJ akan menjadikan capaian IKK tahun sebelumnya sebagai acuan untuk dapat meningkatkan keberhasilan kinerja ditahun berikutnya. Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PPIJJ dan penyusunan target Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

3.6.6 Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Dalam menyusun perencanaan kinerja, Direktorat PPIJJ telah memanfaatkan laporan kinerja sebagai dasar perencanaan untuk menjalankan kegiatan pada tahun berikutnya. Sebelum menyusun target capaian kinerja bulanan yang dituangkan pada Dokumen Rencana Aksi ataupun Rencana Kerja yang akan dijadikan masukan dalam penyesuaian target serta perhitungan capaian kinerja, Direktorat PPIJJ terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap capaian hasil, permasalahan serta tantangan yang dihadapi, serta pengelolaan sumber daya pada laporan kinerja periode sebelumnya sehingga nantinya laporan kinerja tersebut dapat memberikan informasi yang berguna untuk merumuskan tujuan yang lebih akurat dan terukur, serta menentukan prioritas yang lebih tepat.

Dengan menjadikan laporan kinerja sebagai salah satu bahan untuk perencanaan kinerja diperiode selanjutnya, Direktorat PPIJJ mampu merencanakan program dan kegiatan yang lebih efektif dan efisien, serta memastikan keberhasilan capaian kinerja yang lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.

3.6.7 Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Dengan adanya informasi dalam laporan kinerja terkait implementasi penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, menyebabkan adanya pengaruh pada

perubahan budaya kinerja organisasi khususnya di lingkungan Direktorat PPIJJ. Dengan menerapkan SMAP, seluruh pegawai Direktorat PPIJJ turut aktif dalam mencehah tindak pidana korupsi salah satunya dengan melaksanakan Pelatihan SMAP secara berkala setiap tahun.



Gambar III-9 Dokumentasi Pelaksanaan Pelatihan SMAP Direktorat PPIJJ

3.7 Penghargaan Atas Kinerja

Pada tahun 2023, Direktorat PPIJJ telah resmi menyandang sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tanggal 29 November 2023. Setelah Direktorat PPIJJ resmi tersertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP pada tahun 2023, seluruh pegawai Direktorat PPIJJ tetap berkomitmen untuk terus menerapkan dan memelihara SMAP secara konsisten agar tetap berkontribusi dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam berkomitmen menerapkan dan memelihara SMAP, selama Tahun 2024 Direktorat PPIJJ melaksanakan audit pemantauan I (*audit surveillance I*) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan SMAP Tahun 2023. Pelaksanaan *audit surveillance I* berhasil dilalui oleh Direktorat PPIJJ sehingga pada tanggal 20 Desember 2024, Direktorat PPIJJ berhasil mempertahankan status sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP.



Gambar III-10 Bukti Dukung Pelaksanaan Implementasi SMAP Direktorat PPIJJ Tahun 2024



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk penyampaian informasi atas pelaksanaan kinerja Direktorat PPIJJ selama Tahun 2024, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi Eselon II (Unit Kerja). Diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja ini, dapat dijadikan acuan atau inputan untuk mempermudah perbaikan permasalahan yang terjadi dan dapat menjadi langkah percepatan yang harus dilakukan terkait pencapaian kinerja Direktorat PPIJJ.

Penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2024 pertama pada tanggal 23 November 2023 dengan pagu anggaran sebanyak Rp 17.106.189.000,-. Selama tahun 2024, DIPA telah mengalami 13 (tiga belas) kali perubahan. Selain itu, dilakukan juga revisi terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebanyak 3 (tiga) kali perubahan.

Berdasarkan revisi DIPA terakhir, secara keseluruhan anggaran Direktorat PPIJJ tahun 2024 adalah sebesar Rp 16.151.412.000,- dengan realisasi penyerapan keuangan berdasarkan *Integrated e-Monitoring* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat status 13 Januari 2025 adalah sebesar Rp 15.974.598.000,- atau dengan persentase capaian keuangan sebesar 98,90% dari target rencana 100%. Sedangkan realisasi fisik mampu mencapai target rencana yaitu sebesar 100%.

Capaian Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK): Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan telah terealisasi 105,52% yang setara dengan 26,38% sehingga nilai capaian kinerja Direktorat PPIJJ mampu melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 25%.



Gambar V-1 Foto Udara Trayek Jalan Tol Trans Papua

4.1.1 Faktor pendukung Keberhasilan

Capaian Kinerja Direktorat PPIJJ TA 2024 mampu melebihi target yang ditetapkan. Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Direktorat PPIJJ sebagai berikut:

1. Keterlibatan pimpinan dalam mengupayakan peningkatan capaian kinerja, pembagian tugas dan fungsi yang seimbang bagi seluruh pegawai;
2. Dukungan dan kerjasama dari Instansi/Unit Organisasi/Unit Kerja lain dalam melakukan percepatan penyiapan proyek KPBU sektor jalan dan jembatan;
3. Penyusunan Rencana Aksi dan Rencana Kerja tahunan yang diselaraskan dengan Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024;
4. Direktorat PPIJJ mampu merealisasikan sebanyak 4 dari 2 proyek KPBU yang siap dikerjasamakan yang ditargetkan pada Renstra dan Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PPIJJ TA 2024;
5. Direktorat PPIJJ secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala mulai dari mingguan, bulanan, hingga triwulanan;
6. Direktorat PPIJJ mampu mempertahankan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) karena didukung kinerja yang baik oleh Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (Tim FKAP) serta seluruh pegawai Direktorat PPIJJ yang komitmen untuk melaksanakan kegiatan SMAP.

4.1.2 Permasalahan

Selama periode Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat PPIJJ diantaranya:

1. Terdapat beberapa proses penyiapan proyek KPBU sektor jalan dan jembatan yang mundur dari *timeline* yang telah ditargetkan dikarenakan sulitnya mencapai kesepakatan antar pemangku kepentingan;
2. Terdapat beberapa progres proyek yang ditunda karena masih membutuhkan arahan dari pimpinan;
3. Terjadinya gagal lelang (Prakualifikasi dinyatakan gagal) pada proyek *solicited* yaitu Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi dan Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Ciamis dikarenakan tidak menghasilkan badan usaha yang memenuhi kualifikasi, sehingga Direktorat PPIJJ melakukan revaluasi kembali terhadap rencana perusahaan jalan tol. Sampai dengan akhir tahun 2024, hanya Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi yang dapat melakukan Prakualifikasi ulang, sedangkan Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Ciamis masih dalam proses revaluasi

dokumen penyiapan lelang (studi kelayakan) terhadap lingkup perusahaan sebelumnya Gedebage-Ciamis menjadi Gedebage-Tasikmalaya sehingga pelaksanaan Prakuifikasi ulang tidak tercapai pada tahun 2024;

4. Terjadi perubahan struktur pegawai yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pegawai di Direktorat PPIJJ.

4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Agar dapat mencapai target kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya, maka dapat diberikan beberapa rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Percepatan penyelesaian masalah dan isu terhadap proyek KPBU sektor jalan dan jembatan sesuai rencana target yang telah ditentukan;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang meliputi review, pemantauan, evaluasi atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran belanja Direktorat PPIJJ sehingga sesuai dengan agenda yang telah disusun;
3. Pengusulan Sumber Daya Manusia dan pengadaan BMN baru untuk meningkatkan kinerja Direktorat dengan memperhatikan beban kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
4. Mengimplementasikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam seluruh kegiatan/pekerjaan di Direktorat PPIJJ sebagai kelanjutan dalam mempertahankan sertifikat SNI ISO 37001:2016, serta sebagai bentuk komitmen seluruh pegawai dalam mencegah tindak pidana korupsi;
5. Berdasarkan perubahan SOTK terbaru yang telah disahkan melalui Permen Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, pada tahun 2025 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan akan berubah nomenklatur unit kerja menjadi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga sehingga akan menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan Permen Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024.



LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Reni Ahiantini**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2024

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

RENI AHANTINI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		25%	
ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2	Rekomendasi Kebijakan
AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2	Kesepakatan
AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	NSPK
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	9	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp17.106.189.000,00

JAKARTA, 5 JANUARI 2024

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**



RENI AHIANITINI



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Reni Ahianti**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua


TRIONO JUNOASMONO

Pihak Pertama


RENI AHIANI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		25%	
ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2	Rekomendasi Kebijakan
ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2	Rekomendasi Kebijakan
AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2	Kesepakatan
AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	NSPK
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp16.587.392.000,00

JAKARTA, 31 JULI 2024

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

TRIONO JUNOASMONO

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**



RENI AHANTINI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Daftar Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan Tahun 2024

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	-	-
Penyiapan	Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang	Rp6.224.000.000.000,00
	Jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebakwangi (Neglasari)	Rp5.695.000.000.000,00
	Jalan Tol BIUTR	Rp12.589.000.000.000,00
	Jalan Tol Pejagan-Cilacap	Rp28.110.000.000.000,00
	Jalan Tol Akses Patimban Extend (Sadang – Subang)	Rp5.473.000.000.000,00
	Jalan Tol Pluit-Bandara	Rp9.280.000.000.000,00
	Jalan Tol Caringin-Cisarua	Rp8.083.000.000.000,00
	Jalan Tol Cilegon - Anyer	Rp8.220.000.000.000,00
Transaksi	Fly Over Sitingau Lauik	Rp2.806.000.000.000,00
	Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi	Rp24.980.000.000.000,00

JAKARTA, 31 JULI 2024

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**



RENI AHIA NTINI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Erna Wijayanti**

Jabatan : Plt. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2024

Pihak Kedua

TRIONO JUNOASMONO

Pihak Pertama

ERNA WIJAYANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		25%	
ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2	Rekomendasi Kebijakan
ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2	Rekomendasi Kebijakan
AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2	Kesepakatan
AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	NSPK
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp16.467.392.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2024

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**


TRIDNO JUNOASMONO

**Pt. DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**


ERNA WIJAYANTI

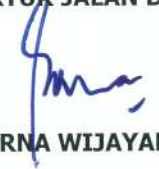
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Daftar Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan Tahun 2024

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	-	-
Penyiapan	Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang	Rp6.224.000.000.000,00
	Jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebakwangi (Neglasari)	Rp5.695.000.000.000,00
	Jalan Tol BIUTR	Rp12.589.000.000.000,00
	Jalan Tol Pejagan-Cilacap	Rp28.110.000.000.000,00
	Jalan Tol Akses Patimban Extend (Sadang – Subang)	Rp5.473.000.000.000,00
	Jalan Tol Pluit-Bandara	Rp9.280.000.000.000,00
	Jalan Tol Caringin-Cisarua	Rp8.083.000.000.000,00
	Jalan Tol Cilegon - Anyer	Rp8.220.000.000.000,00
Transaksi	Fly Over Sitinjau Lauik	Rp2.806.000.000.000,00
	Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi	Rp24.980.000.000.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2024

**Plt. DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**


ERNA WIJAYANTI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Erna Wijayanti**

Jabatan : Plt. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua

TRIONO JUNOASMONO

Pihak Pertama

ERNA WIJAYANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		25%	
ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2	Rekomendasi Kebijakan
ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2	Rekomendasi Kebijakan
AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2	Kesepakatan
AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	NSPK
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	14	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan

KEGIATAN

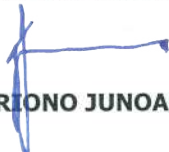
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp16.151.412.000,00

JAKARTA, DESEMBER 2024

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**


TRIONO JUNOASMONO

**Pt. DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**


ERNA WIJAYANTI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Daftar Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan Tahun 2024

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	-	-
Penyiapan	Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang	Rp6.224.000.000.000,00
	Jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebakwangi (Neglasari)	Rp5.695.000.000.000,00
	Jalan Tol BIUTR	Rp12.589.000.000.000,00
	Jalan Tol Pejagan-Cilacap	Rp28.110.000.000.000,00
	Jalan Tol Akses Patimban Extend (Sadang – Subang)	Rp5.473.000.000.000,00
	Jalan Tol Pluit-Bandara	Rp9.280.000.000.000,00
	Jalan Tol Caringin-Cisarua	Rp8.083.000.000.000,00
	Jalan Tol Cilegon - Anyer	Rp8.220.000.000.000,00
Transaksi	Fly Over Sitinjau Lauik	Rp2.806.000.000.000,00
	Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi	Rp24.980.000.000.000,00

JAKARTA, DESEMBER 2024

Pit. DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN


ERNA WIJAYANTI

LAMPIRAN II

BUKTI DUKUNG CAPAIAN KINERJA





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGATUR JALAN TOL

Gedung Bina Marga Lantai 2 - 3 Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7258063, 7257126 Fax. (021) 7257126

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI PELELANGAN PENGUSAHAAN JALAN TOL GILIMANUK-MENGWI

PREQUALIFICATION TENDER ANNOUNCEMENT FOR GILIMANUK-MENGWI TOLL ROAD CONCESSION

Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bermaksud melaksanakan Prakualifikasi:

Indonesia Toll Road Authority, Ministry of Public Works and Housing intends to initiate a Tender Pre-qualification for the project as described below.

Nama Proyek Project Name	Pengusahaan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi (96,84Km) <i>Gilimanuk-Mengwi Toll Road Concession (96.84 Km)</i>
Dasar Hukum Kerjasama Legal Basis	UU 38 Tahun 2004 dan perubahannya, PP 23 Tahun 2024, Perpres 38 Tahun 2015, dan peraturan terkait lainnya. <i>Law No 38 year 2004 and its amendments, Government Regulation No 23 year 2024 and its amendments, Presidential Regulation No 38 year 2015 and other related regulations.</i>
Perkiraan Nilai Investasi Investment Cost Estimation	Rp25,404 triliun <i>IDR 25.404 trillion</i>
Lingkup Proyek Project Scope	Melakukan pendanaan, perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi pada porsi Badan Usaha Jalan Tol serta pengoperasian dan preservasi untuk keseluruhan ruas Jalan Tol. <i>Project funding, technical planning, project construction on the portion of Toll Road Company, along with the operation and preservation for the entire Toll Road</i>
Dukungan Pemerintah Government Support	Direncanakan dalam bentuk dukungan konstruksi pada Seksi Soka-Mengwi <i>It is planned in the form of construction support for the Soka-Mengwi Section</i>
Bentuk Kerjasama Concession Scheme	Bangun, Guna, Serah, dengan Dukungan Pemerintah <i>Build, Operate, and Transfer with Government Support</i>

Proses Prakualifikasi akan dilakukan secara elektronik (daring). Peminat dapat melakukan pendaftaran pada jam kerja (Pukul 08.00 – 16.00 WIB) mulai Jumat, 6 September 2024 hingga Senin, 30 September 2024 pada situs sebagai berikut:

The Prequalification process will be carried out electronically. Interested party can register during working hour, 08.00 – 16.00 Western Indonesian Time (UTC+07:00), from Friday, September 6th 2024 to Monday, September 30th 2024 at the following website address:

https://bpjt.pu.go.id/invest_reg_gilmeng

Panitia Pelelangan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Email: lelangjalantol@pu.go.id



Seluruh badan usaha baik badan usaha tunggal maupun berbentuk konsorsium dibolehkan untuk mendaftar. Pendaftaran Prakualifikasi hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama Perusahaan atau pihak yang dikuasakan oleh Direktur Utama dengan melampirkan Surat Kuasa. Pihak yang mengunduh dokumen wajib mencantumkan salinan identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Seluruh proses Prakualifikasi ini tidak dipungut biaya apapun.

Any interested companies both single business entities and consortium are allowed to register. Only the President Director or Authorized Person with Power of Attorney can register the pre-qualification. Copy of ID attachment is required. All pre-qualification processes are free of charge.

Penjelasan umum mengenai Dokumen Prakualifikasi akan dilaksanakan pada:

General explanation of the Pre-qualification Documents will be held on:

Hari, Tanggal : Kamis, 19 September 2024
Waktu : 10.00 WIB
dengan rincian akan ditentukan dalam dokumen prakualifikasi.

Day, Date : Thursday, September 19th 2024
Time : 10.00 (UTC+07:00)
details will be informed in the Prequalification document.

Badan Usaha atau Konsorsium yang berminat diundang untuk memasukkan dokumen kualifikasi sesuai kriteria Dokumen Prakualifikasi.

Any interested Business Entity and Consortium may submit a qualification document in accordance with the Prequalification Document.

Pertanyaan dan informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada alamat di atas.

Further inquiry, please contact the above address.

Jakarta, 3 September 2024/ Jakarta, September 3rd, 2024
Panitia Pelelangan Jalan Tol/ Toll Road Tender Committee

Pengumuman Prakualifikasi Pelelangan Pengusahaan
Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi
*Announcement of Prequalification Schedule for Tender
Gilimanuk - Mengwi Toll Road Concession*

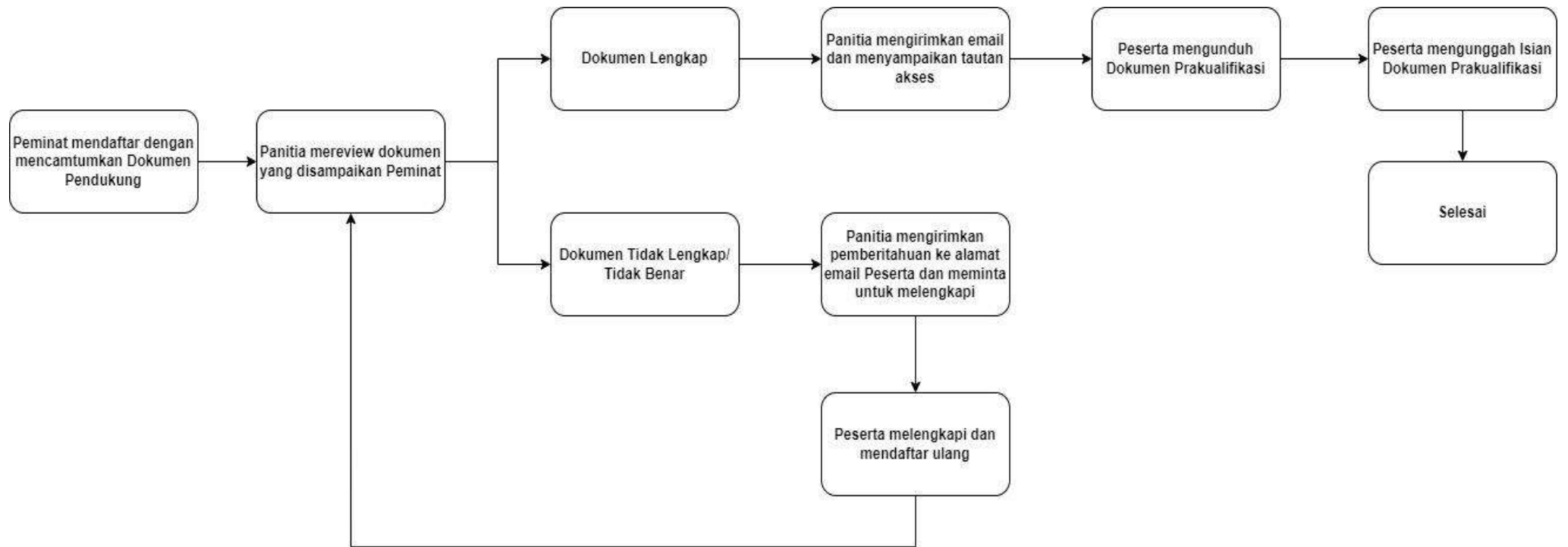
Pengumuman pelaksanaan prakualifikasi dengan jadwal sebagai berikut:

Announcement of prequalification with schedule are as follows:

	Jadwal
Pengambilan Dokumen Prakualifikasi (mulai) <i>Prequalification Document Collection (begin)</i>	September 6 th 2024
Batas Akhir Waktu Pengambilan Dokumen Prakualifikasi <i>Deadline for Prequalification Documents Collection</i>	September 30 th 2024
Penjelasan Dokumen Prakualifikasi <i>General Explanation of the Prequalification Documents</i>	September 19 th 2024
Batas Akhir Waktu Pemasukan Isian Dokumen Prakualifikasi <i>PQ Submission</i>	October 1 st 2024

Jakarta, 3 September 2024/ Jakarta, September 3rd, 2024
Panitia Pelelangan Jalan Tol/ Toll Road Tender Committee

Bagan Alir Proses Prakualifikasi:





**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : PB 0201-Mn/1031

Jakarta, 1 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (berkas)

Hal : Penunjukan Pemenang Lelang Pengadaan Badan
Usaha Pelaksana Proyek KPBU Pembangunan
Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I)

**Yth. Konsorsium PT Utama Karya (Persero) dan PT Utama Karya Infrastruktur
Di Tempat**

Sehubungan dengan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Pembangunan *Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I)* ("Proyek KPBU Sitinjau Lauik") serta memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; ("Peraturan LKPP 19/2015");
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 603/KPTS/M/2023 tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama untuk Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pembangunan *Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I)*;

8. Berita Acara Hasil Negosiasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Pembangunan *Flyover* Panorama I (Sitinjau Lauik I) Nomor 15/BA/KPBU.SL/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
9. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor PB 0201-Mn/991 tanggal 18 Oktober 2024 hal Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Pembangunan *Flyover* Panorama I (Sitinjau Lauik I).

Kami menunjuk Konsorsium PT Utama Karya (Persero) dan PT Utama Karya Infrastruktur sebagai Pemenang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek KPBU Sitinjau Lauik, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup Pengusahaan Proyek KPBU Sitinjau Lauik yang dilaksanakan oleh Pemenang Pelelangan melalui Badan Usaha Pelaksana dengan skema *Design, Build, Finance, Operate, Maintain, and Transfer* (DBFOMT) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan Seluruh Kegiatan untuk Menyediakan Layanan;
 - b. Pendanaan Pengadaan Tanah;
 - c. Perencanaan Teknis Terperinci (RTT) Jalan dan Jembatan;
 - d. Pada Masa Konstruksi BUP Wajib Melaksanakan: Pembangunan Jalan dan Jembatan (FO) Sepanjang 2,781 Km; Pembangunan Jalan Kerja sebagaimana Basic Design, Pemeliharaan jalan dan jembatan Eksisting, Penyediaan Sistem dan Alat *Weight-in-Motion* (WIM); dan Pengawasan Terkait *Quality Assurance*;
 - e. Preservasi Jalan dan Jembatan (FO) sesuai RTT Selama Masa Layanan;
 - f. Penyusunan dan Perolehan Perizinan yang Menjadi Kewajiban BUP.
2. Masa Kerjasama adalah selama 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan, yang terdiri dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Masa Konstruksi dan 10 (sepuluh) tahun Masa Layanan terhitung sejak berlakunya Tanggal Efektif sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Proyek KPBU Pembangunan *Flyover* Panorama I (Sitinjau Lauik I) ("Perjanjian KPBU").
3. Skema pengembalian investasi pada pengusahaan Proyek KPBU Sitinjau Lauik berupa pembayaran atas ketersediaan layanan dengan nilai ketersediaan layanan sebesar Rp570.060.657.587,00 (lima ratus tujuh puluh miliar enam puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) per tahun (belum termasuk PPN) atau sebesar Rp638.467.936.497,00 (enam ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) per tahun (termasuk PPN) selama masa layanan.
4. Pemenang Pelelangan berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membentuk Badan Usaha Pelaksana untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian KPBU, Perjanjian KSPI dan Perjanjian Penjaminan serta memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak surat penunjukan ini;
 - b. Memastikan Badan Usaha Pelaksana menandatangani Perjanjian KPBU paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terbentuknya Badan Usaha Pelaksana; dan
 - c. Memperpanjang masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan Perjanjian KPBU atau sampai dengan berlaku efektifnya Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemenuhan Indikator Masa Konstruksi.
5. Proses pengusahaan penyediaan layanan dan metoda perhitungan pembayaran *Availability Payment* (AP) akan diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

6. Apabila Pemenang Pelelangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir 4 maka Surat Penunjukan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Pembangunan *Flyover* Panorama I (Sitinjau Lauik I) ini dinyatakan batal dan Pemenang Pelelangan dianggap mengundurkan diri serta berlaku ketentuan Dokumen Permintaan Proposal dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Tim KPBU Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Pembangunan *Flyover* Panorama I (Sitinjau Lauik I).



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : BM 0701-Mn/239
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penetapan Rencana Usaha Pengusahaan
Jalan Tol Ruas Betung (Sp.Sekayu)-
Tempino-Jambi

Jakarta, 5 April 2024

Yth. Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero)
di Jakarta

Berkenaan dengan rencana pengusahaan Jalan Tol Ruas Betung (Sp.Sekayu)-Tempino-Jambi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024;
 - d. Berita Acara Hasil Negosiasi Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) Nomor 04/BA/Dp/2023 tanggal 17 Juli 2023;
 - e. Surat Direktur Utama PT Hutama Karya Nomor DU/RJT.3887/PU/196.1/XI/2023 tanggal 10 November 2023 perihal Penyampaian Rencana Usaha Ruas Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi;
 - f. Surat Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan BPKP Nomor PE.12.03/LHP-232/D103/1/202 tanggal 28 Desember 2023 hal Laporan Hasil Reviu dalam rangka Evaluasi Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Betung-Tempino-Jambi dengan skema Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL);
 - g. Surat Plt. Deputi Kepala BPKP Nomor PE.11.03/SP-39/D1/03/2024 tanggal 26 Januari 2024 hal Laporan Hasil Reviu atas Rencana Usaha Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Betung-Tempino-Jambi melalui skema Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL);
 - h. Surat Menteri BUMN Nomor S-113/MBU/02/2023 tanggal 26 Februari 2024 hal Tanggapan atas Permohonan Pertimbangan Skema Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II Ruas Betung-Tempino-Jambi PT Hutama Karya;
 - i. Surat Plh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko a.n Menteri Keuangan Nomor S-50/MK.8/2024 tanggal 18 Maret 2024 hal Pertimbangan atas Rencana Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II Ruas Betung-Tempino-Jambi;
 - j. Surat Direktur Jenderal Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor BM 0701-Dp/103.1 tanggal 1 April 2024 hal Penyampaian Reviu dan Pertimbangan atas Pengusahaan Jalan Tol Ruas Betung (Sp.Sekayu)-Tempino-Jambi;
 - k. Berita Acara Rencana Usaha Pada Pengusahaan Jalan Tol Ruas Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi Nomor 05/BA/Dp/2024 tanggal 5 April 2024
 - l. Nota Dinas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 97/ND/Dp/2024 tanggal 5 April 2024 hal Rencana Pengusahaan Jalan Tol Ruas Betung (Sp.Sekayu)-Tempino-Jambi;

menetapkan Rencana Usaha Pengusahaan Jalan Tol Ruas Betung (Sp.Sekayu)-Tempino-Jambi dengan parameter utama sebagai berikut:

- a. Lingkup pengusahaan jalan tol adalah Jalan Tol Betung (Sp.Sekayu)-Tempino-Jambi sepanjang 170,73 km dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi pada Segmen Betung-Tungkal Jaya, Segmen Tungkal Jaya-Bayung Lencir dan Segmen Tempino-Sp. Ness sepanjang 136,63 km;
 - Operasi dan Preservasi pada keseluruhan ruas sepanjang 170,73 km, termasuk Segmen Bayung Lencir-Tempino yang konstruksinya dilaksanakan oleh Pemerintah;
 - Penyediaan peralatan tol untuk keseluruhan ruas sepanjang 170,73 km;
- b. Pembayaran Berkala Berbasis Layanan ("PBBL") dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan indikator kinerja, dengan jangka waktu dan besaran sebagai berikut:
 - Masa PBBL selama 15 Tahun untuk masing-masing segmen;
 - Besaran PBBL masing-masing segmen sebagai berikut:

Segmen	Betung-Tungkal Jaya	Tungkal Jaya-Bayung Lencir	Bayung Lencir-Sp Ness	Total
Total PBBL per tahun selama 15 Thn	1.377	1.520	881	3.778
<i>PBBL Capital Expenditure</i>	935	1.176	455	2.565
<i>PBBL Operation Expenditure</i>	442	345	426	1.213

2. Pelaksanaan konstruksi pada Jalan Tol Ruas Betung (Sp.Sekayu)-Tempino-Jambi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Prinsip/metode perhitungan Rencana Usaha Pengusahaan Jalan Tol Ruas Betung (Sp.Sekayu)-Tempino-Jambi akan diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebelum jalan tol dioperasikan secara penuh.
4. PT Utama Karya (Persero) bersama-sama dengan Direktur Jenderal Bina Marga segera melakukan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Betung (Sp.Sekayu)-Tempino-Jambi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Plt. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
5. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : BM 0701-Mn/855
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penetapan Rencana Usaha
Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera
Ruas Palembang-Betung

Jakarta, 20 September 2024

Yth. Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero)
di Jakarta

Berkenaan dengan rencana pengusahaan Jalan Tol Ruas Palembang-Betung, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Jalan Tol;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
 - d. Surat Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE.12.03/SP-69/D1/2023 tanggal 28 Desember 2023 hal Laporan Hasil Reviu dalam rangka Evaluasi Nilai Biaya Konstruksi pada Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Kayu Agung-Palembang-Betung;
 - e. Surat Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Nomor DU/RJT.1147/PU/78/IV/2024 tanggal 22 April 2024 perihal Rencana Pengusahaan Ruas Jalan Tol Palembang-Betung
 - f. Surat Menteri Keuangan Nomor S-564/MK.06/2024 tanggal 8 Juli 2024 hal Tanggapan atas Permohonan Pertimbangan Skema Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II Ruas Palembang-Betung;
 - g. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-354/MBU/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 hal Tanggapan atas Permohonan Pertimbangan Skema Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II Ruas Palembang-Betung PT Hutama Karya (Persero);
 - h. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BM 0701-Mn/710 tanggal 2 Agustus 2024 hal Skema Pengusahaan Jalan Tol Palembang-Betung;

- i. Surat Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Nomor DU/RJT.3585/PU/140/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 perihal Rencana Pengusahaan Jalan Tol Ruas Palembang-Betung;
- j. Berita Acara Rencana Usaha Pada Pengusahaan Jalan Tol Ruas Palembang-Betung Nomor 08/BA/Dp/2024 tanggal 9 September 2024
- k. Nota Dinas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 190/ND/Dp/2024 tanggal 17 September 2024 hal Rencana Pengusahaan Jalan Tol Ruas Palembang-Betung;

Menetapkan Rencana Usaha Pengusahaan Jalan Tol Ruas Palembang-Betung dengan parameter utama sebagai berikut:

- a. Lingkup pengusahaan jalan tol dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan preservasi untuk keseluruhan ruas Jalan Tol Palembang-Betung sepanjang 69,19 km (STA 42+500 s.d. STA 111+690);
 - Pelaksanaan konstruksi sisa pekerjaan Simpang Susun Kramasan sepanjang 1,07 km (STA 41+513 s.d. STA 42+584).
- b. Tarif tol awal adalah sebagai berikut:

Golongan	Tahun 2024 (Rp/km) Seksi III-IV (Sungai Rengas-Pangkalan Balai) beroperasi	Tahun 2026 (Rp/km) Seksi I-IV (Kramasan-Pangkalan Balai) beroperasi penuh
I	1.503	1.978
II	2.255	2.967
III	2.255	2.967
IV	3.006	3.959
V	3.006	3.595

- c. Masa konsesi adalah selama 50 (lima puluh) tahun dihitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pertama diterbitkan oleh Pemerintah.
2. Pelaksanaan konstruksi pada lingkup pengusahaan Jalan Tol Ruas Palembang-Betung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Prinsip/metode perhitungan Rencana Usaha Pengusahaan Jalan Tol Ruas Palembang-Betung akan diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebelum jalan tol dioperasikan secara penuh.
 4. Atas kuantitas, kualitas dan biaya realisasi progres konstruksi yang dilaksanakan oleh PT Waskita Sriwijaya Tol akan dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan tetap memperhatikan hasil Laporan Reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana tersebut pada butir 1.d. PT Hutama Karya (Persero) agar melakukan penyelesaian hak dan kewajiban antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Sriwijaya Tol dengan mengacu pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

5. PT Utama Karya (Persero) bersama-sama dengan Badan Pengatur Jalan Tol segera melakukan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Palembang-Betung.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**



M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
5. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

LAMPIRAN III

PENGUKURAN KINERJA



Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKK	Janis Indikator	KRO (Kode RO)	RO	Satuan	Target Renstra	Target DIPA	Target PK (%)	Bobot RO (%)	Realisasi Capaian RO	Realisasi Capaian RO (dalam 100 %)	Realisasi Capaian RO (dalam 25 %)	Total Capaian PK (%)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya												
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan												
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan (50%)	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (ABF)	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	2	25%	10%	2	10%	2,5%	26,38%
			Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	-	-		-	-	-		
			Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1		15%	1	15%	3,75%	
			Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2		15%	2	16,05%	4,01%	
	Tingkat implementasi kegiatan transaksi paket pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan (50%)	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (AFA)	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	1	1		10%	7	11,5%	2,88%	
		Kemitraan (AEE)	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	2	2		30%	4	33%	8,25%	
		Layanan Manajemen Kinerja Internal (EBD)	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	6	6		20%	6	20%	5%	

LAMPIRAN IV

BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 7200793

BERITA ACARA KESEPAKATAN

NOMOR : 19 / BA / Dp / 2024

Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 bertempat di Hotel Kuretakeso Kemang Jakarta Selatan telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024 yang dihadiri oleh perwakilan dari Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Rapat ini bertujuan untuk menyepakati Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum TA. 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/ /INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
SS: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau			
IKSS: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	59,79	59,74	99,92
SP: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman			
IKSP: Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100,00	200,06	200,06
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
SS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSS 1. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif	100,00	163,47	163,47
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif	100,00	99,33	99,33
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	99,37	99,96	100,59

2. Capaian Kinerja pada Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI TA. 2024

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	14,96	99,73
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	15	100
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	15,34	102,27
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	15,43	102,85
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15	14,50	96,65
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	15	15,24	101,58
7	Nilai SAKIP Unit Organisasi	10	10,13	101,30

b. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100	111,73	111,73

c. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25	23,77	95,08

d. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25	26,38	105,52

e. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25	25,42	101,68

f. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25	24,73	98,92
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100	100,55	100,55

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Desember 2024

Yang Menyepakati,

Sekretaris Direktorat Jenderal



Reni Ahiantini

Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan



Agus Sulaeman

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air



Harya Muldianto

Plt. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan



Erna Wijayanti

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman



Meike Kencanawulan Martawidjaja

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan



Haryo Bakti Martoyoedo

Mengetahui,
Direktur Jenderal



Tripho Junoasmono

Lampiran Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI TA. 2024

Nomor : 19/BA/DP/2024

Tanggal : 31 Desember 2024

A. Capaian Kinerja Bantuan Pembiayaan Perumahan TA. 2024

NO	BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET UNIT	REALISASI	
				KEUANGAN (Rp)	UNIT
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	24.220.000.000.000	220.000	24.577.192.153.214	200.300
2	Subsidi Selisih Bunga (SSB)*	4.609.438.646.000	751.735	4.609.438.646.000	732.927
3	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)**	895.000.000.000	220.000	852.348.000.000	208.869
4	SMF	-	11.540	12.400.526.222.312	271.653
5	TAPERA	1.431.900.000.000	7.251	934.222.383.307	5.780
TOTAL		31.156.338.646.000	238.791	43.373.727.404.833	477.733

Keterangan:

Target unit berdasarkan Revisi Renstra DJPI TA. 2020-2024

*) Anggaran SSB digunakan untuk pembayaran penerbitan KPR tahun 2015-2020 sebanyak 751.735 unit, tidak ada akad baru sejak 2021, dan realisasi unit tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

**) Realisasi unit SBUM tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

B. Capaian Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	KATEGORI	JUMLAH PERTANYAAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI (%)	BOBOT (%)
1	Perencanaan	9	44 Responden	97,27%	29,18%
2	Pelaksanaan	7		97,12%	
3	Outcomes	5		97,42%	

Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada 44 Responden didapatkan nilai sebesar 97,27%, sehingga **capaian Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024 adalah sebesar 29,18%.**

C. Capaian Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Survei Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	KATEGORI	JUMLAH PERTANYAAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI (%)	BOBOT (%)
1	Input Kegiatan	10	44 Responden	98,75	29,33
2	Aktivitas Kegiatan	3		98,23	
3	Output Kegiatan	2		97,85	

NO	KATEGORI	JUMLAH PERTANYAAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI (%)	BOBOT (%)
4	Outcomes Kegiatan	9		97,42	
5	Impact Kegiatan	2		96,55	

Hasil Survei Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada 44 Responden didapatkan nilai sebesar 97,76%, sehingga **capaian Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024** adalah sebesar 29,33%.

D. Capaian Kinerja Paket Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan (35%)

NO	SEKTOR	TARGET	REALISASI		
		JUMLAH PROYEK	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	TAHAPAN
1	Sumber Daya Air	9	10	Bendungan Lambakan	Perencanaan
				Bendungan Saddang	Perencanaan
				DI Jambo Aye, Aceh	Penyiapan
				DI Lhok Guci, Aceh	Penyiapan
				Bendungan Merangin	Penyiapan
				PLTM Leuwikeris, Jawa Barat	Penyiapan
				Bendungan Bodri	Penyiapan
				Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok	Penyiapan
				Optimalisasi dan Revitalisasi DI Komering	Penyiapan
				Bendungan Cidanau	Penyiapan
2	Jalan dan Jembatan	8	3	Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang	Penyiapan
				Jalan Tol Pluit Bandara	Penyiapan
				Jalan Tol Malang - Kepanjen	Penyiapan
3	Perumahan	2	3	Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus)	Penyiapan
				Rusun Cisaranten Bina Harapan	Penyiapan
				Rusun Kota Surabaya	Penyiapan

NO	SEKTOR	TARGET	REALISASI		
		JUMLAH PROYEK	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	TAHAPAN
4	Permukiman	5	6	SPAM Bitung	Penyiapan
				Integrasi SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Regional Singdangheula	Penyiapan
				SPAM Regional Lombok	Penyiapan
				SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	Penyiapan
				SPAM - SPAL IKN	Penyiapan
				SPAM Regional Ayung I	Penyiapan
5	Lainnya	-	2	Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengelolaan SPAM	Penyiapan
				KSP Wisma Werdhapura	Penyiapan
TOTAL		24	24		
Capaian Proyek Tahap Perencanaan dan Penyiapan (35%)			35%		

Keterangan:

- Target berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan terdiri dari Studi Pendahuluan/Pra FS, OBC, FBC (FS)

E. Capaian Kinerja Paket Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Siap Dikerjasamakan Tahun 2024 (35%)

NO	SEKTOR	TARGET		REALISASI			
		JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI	TAHAPAN
1	Sumber Daya Air	2	2.570.400.000.000	1	PLTA Tiga Dihaji, Sumatera Selatan	920.399.742.833	<i>Bid Award</i>
2	Jalan dan Jembatan	2	28.210.000.000.000	4	Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi	25.404.000.000.000	PQ
					Flyover Sitinjau Lauik	2.793.000.000.000	<i>Bid Award</i>
					Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi	21.012.000.000.000	PPJT
					Jalan Tol Palembang – Betung	14.981.000.000.000	PPJT
3	Perumahan	2	996.424.481.923	1	Rusun Karawang Spuur	272.474.481.923	Pengajuan Lelang
4	Permukiman	2	4.802.000.000.000	2	B to B SPAM Kertasari	1.047.000.000.000	<i>Financial Close</i>
					SPAM Terintegrasi Kota Bandung 3500 lpd	3.755.000.000.000	Pembentukan BUP
TOTAL		8	36.578.824.481.923	8	70.184.874.481.923		
Capaian Proyek Siap Dikerjasamakan (35%)				35%			
Capaian Nilai Investasi Proyek Siap Dikerjasamakan (70%)				134,31%			

Keterangan:

- Target berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Proyek Siap Dikerjasamakan minimal masuk Tahap Prakualifikasi
- Nilai Investasi yang dihitung sebagai capaian IKSS merupakan nilai investasi proyek siap untuk lelang (minimal Tahap Prakualifikasi)

F. Capaian Realisasi Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	KEUANGAN (%)		FISIK (%)		
					RN	RL	RN	RL	KINERJA
I	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	25.090.354	24.032.934	100,00	95,79	100,00	100,00	100,00
1	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	25.090.354	24.032.934	100,00	95,79	100,00	100,00	100,00
II	WA	Program Dukungan Manajemen	146.941.448	141.429.056	100,00	96,25	100,00	100,00	100,00
1	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	90.844.706	86.988.171	100,00	95,75	100,00	100,00	100,00
2	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	11.180.110	10.691.740	100,00	95,63	100,00	100,00	100,00
3	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	44.916.632	43.749.146	100,00	97,40	100,00	100,00	100,00
TOTAL			172.031.802	165.461.990	100,00	96,18	100,00	100,00	100,00

Sumber: <https://iemon.pu.go.id/> status: 31 Desember 2024

LAMPIRAN V

PENGHARGAAN



Tanggal : 20 Desember 2024
Nomor : 9207.62/EXT-MUTU/XII/2024 - MUTU 4013.5 (1-3) 03102021
Perihal : Status sertifikasi pasca audit surveillance

Kepada Yth.
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Salam hangat dari MUTU International,

Bersama ini kami sampaikan keputusan status sertifikasi pasca audit surveillance dengan rincian sebagai berikut.

Nama organisasi klien	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Skema sertifikasi	ISO 37001
Nomor sertifikat	ABMS-134
Tanggal audit surveillance	14 November 2024 s/d 15 November 2024
Status sertifikasi pasca audit surveillance	Dipertahankan sesuai ruang lingkup sertifikasi

Demikian informasi ini kami sampaikan dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui email msc@mutucertification.com. Kami ucapkan terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,



Isyana Dewi
VP Sub Divisi Operasional II SBU Sertifikasi Pertanian Industri dan Jasa Publik

LAMPIRAN VI

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN





Gambar 1 FGD Pedoman Standar Penyusunan *Feasibility Study* Pengusahaan Jalan Tol tanggal 19 Februari 2024



Gambar 2 Audiensi Rencana Proyek KPBK Jalan Tol Pejagan-Cilacap Bersama Pemprov Jawa Tengah tanggal 27 Maret 2024



Gambar 3 Konsinyering Negosiasi Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) Proyek Jalan Tol Ruas Betung – Jambi tanggal 22 April 2024



Gambar 4 Rapat Koordinasi Pembentukan Konsep Panel Badan Usaha Sektor Jalan Tol tanggal 8 Mei 2024



Gambar 5 Rapat Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Q1 dan Q2 TA. 2024 Direktorat PPIJJ



Gambar 6 Penyusunan Rencana Umum Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Pembiayaan Kreatif Sektor Jalan Tol Tahun 2025-2029 tanggal 11-12 Juli 2024



Gambar 7 Survei Lapangan Aanwijzing ke Lokasi Proyek Fly Over Sitinjau Lauik tanggal 27 Juni 2024



Gambar 8 Penandatanganan Proyek Jalan Trans Papua Segmen Mamberamo-Elelim Tanggal 3 Juli 2024



Gambar 9 Market Consultation Proyek Jalan Tol Gedebage-Ciamis & Gilimanuk-Mengwi tanggal 9-10 Juli 2024



Gambar 10 Pendampingan Pelaksanaan Survei dan Permintaan Data untuk Penyusunan Dokumen Pendukung PProyek KPBU Jalan Tol Malang – Kepanjen tanggal 15-17 Juli 2024



Gambar 11 Pembahasan Progres Penyiapan Proyek Jalan Tol Pejagan – Cilacap dan Jalan Tol BIUTR yang difasilitasi oleh KIAT pada tanggal 17 Juli 2024



Gambar 12 Pelatihan SMAP Direktorat PPIJJ tanggal 24 September 2024



Gambar 13 Penandatanganan PPJT Jalan Tol Palembang-Betung (Baigan dari Kayu Agung-Palembang-Betung) tanggal 30 September 2024



Gambar 14 Audiensi Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Pengusahaan BIUTR bersama Pemkot Bandung pada tanggal 8 Oktober 2024



Gambar 15 Survei Lokasi Rencana Pembangunan BIUTR 11-12 Oktober 2024



Gambar 16 Rapat Negosiasi Proyek Flyover Sitinjau Lauik tanggal 14 Oktober 2024



Gambar 17 Audiensi dengan Pemda dan Survei Lapangan terkait Rencana Pembangunan Jalan Tol Sukabumi – Ciranjang pada tanggal 11-13 Agustus 2024



Gambar 18 Progres Konstruksi Proyek Jalan Tol Betung (Sp Sekayu) – Tempino – Jambi Seksi 4 Tempino – IC Ness



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN**